



RENSTRA RENCANA STRATEGIS

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

TAHUN 2025 - 2029



DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
BATAM
2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami sampaikan ke Allah Ta'ala Yang Maha Esa dan rakyat dan insanid-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Etna Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2023-2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman untuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air di Kota Batam dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang sejalan dengan visi pembangunan Kota Batam: "Batam Kota Maju Yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata." Yang membidakan pada paragraf kota mandiri yang mandiri, berkelanjutan dan berbudaya. Dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan membidakan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu meningkatkan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Rencana Strategis ini merupakan penyusunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2023-2029 serta membidakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW), Rencana Tata Ruang (RTR), kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten pembangunan daerah. Di dalamnya terdapat analisis situasi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas untuk mencapai berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan harmonisasi lingkungan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan, akademisi, swasta, maupun masyarakat yang telah memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan Renstra ini.

Demikian dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air di Kota Batam, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di bidang infrastruktur.

Batam, September 2023

Majelis Dinas Etna Marga dan Sumber

Daya Air Kota Batam



Dr. H. H. H. H. H.
Ketua
NIP. 197400183000003000

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-7
1.3 Misi dan Visi	1-16
1.4 Rancangan Struktur	1-18
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PENGELOLAAN DAN INI- STRATEGIS PERANGKAT LAMBAHAN	2-00
2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi	2-00
2.1.1 Tujuan	2-00
2.1.2 Fungsi	2-00
2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air	2-20
2.2 Sumber Daya Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air	2-01
2.2.1 Sumber Daya Manusia	2-00
2.2.1.1 Kapasitas	2-00
2.2.1.2 Jumlah Karyawan Pegawai Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air	2-04
2.2.1.3 Impedasi Kinerja dan Efisiensi	2-04
2.2.2 Sumber Prasarana Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air	2-06
2.2.2.1 Kondisi Ketersediaan Prasarana Prasarana Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air	2-06
2.2.2.2 Kondisi Ketersediaan Prasarana Prasarana Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air	2-06
2.2.2.3 Ketersediaan Sistem dan Prasarana Hidroelektrik	2-07
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Kota Kotamadya	2-08
2.3.1 Bidang Kota Marga	2-08
2.3.2 Bidang Penertapan Jalan Umum	2-09
2.3.3 Bidang Pemeliharaan Pengerukan	2-10
2.3.4 Bidang Sumber Daya Air	2-10
2.3.5 Bidang Ketersediaan	2-17
2.4 Sistem Dinas Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air	2-11

2.8 Pemeliharaan dan Ins. Strategi: Deras Rata Marga dan Sumber Daya Air	2-42
2.8.1 Pemeliharaan Deras Rata Marga dan Sumber Daya Air	2-42
2.8.2 Ins. Strategi Deras Rata Marga dan Sumber Daya Air	2-42
2.8.3 Pemeliharaan dan Hama/seras	2-43
2.8.3.1 Pemeliharaan Dalam upaya/nya pemeliharaan infrastruktur pelayanan umum	2-43
2.8.3.2 Pemeliharaan Infrastruktur Jalan	2-46
2.8.3.3 Pemeliharaan Sungai	2-46
2.8.4 Gempala	2-47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAN KEBERHASILAN	12-10
3.1 Ketahanan Tujuan Sistem Deras Rata Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dengan Hal. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2023-2028	12-10
3.2 Tujuan Sistem Deras Rata Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2023-2028	12-12
3.3 Sasaran Sistem Deras Rata Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2023-2028	12-13
3.4 Strategi/Program Deras dalam Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana PD Tahun 2023-2028	12-15
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGAAN BIDANG KUTIPAN	17-42
4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Sistem Energi Indikator Target dan Pengu. Indikator	17-71
4.2 Uraian Program Dalam Rangka Mendukung Program/Proses Pembiayaan Daerah	17-82
4.2.1 Rencana 1) Mewujudkan Akreditasi Masyarakat yang Aman dan Nyaman, Indikator Sistem: Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	17-83
4.2.1.1 Program Penyelenggaraan Jalan, Indikator Kinerja: Persentase Panjang Jalan yang Diperbaiki	17-89
4.2.1.2 Program Penyelenggaraan Jalan Konstruksi, Indikator Kinerja: Persentase Pekerjaan Jalan Konstruksi yang Ditibukan UJHBM	17-92
4.2.1.3 Program Penyelenggaraan Lala Lanta dan Angkutan Jalan (LAL) Indikator Kinerja: Persentase Pembiayaan Jalan Titik (PJT) dalam Kondisi Baik	17-93
4.2.2 Rencana 2) Mewujudkan Peningkatan Masyarakat terhadap Sungai, Indikator Sistem: Persentase Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sungai Sungai	17-93

4.3.2.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (KDA), Indikator Kinerja Pemasok Infrastruktur Sumber Daya Air yang Disiapkan	10-91
4.3.2.2	Program Pengaliran dan Pengembangan Sistem Drainase, Indikator Kinerja Pemasok Sistem Drainase yang Disiapkan	10-91
4.3.2	Batasan 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasok, Indikator Batasan: Indeks Kepuasan Masyarakat di Dini Baru Marga dan Sumber Daya Air	10-92
4.3	Uraian Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Pemasok Peningkatan Daerah	10-93
4.3.1	Batasan 1: Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman, Indikator Batasan: Pemasok Jalan Dalam Kondisi Masa	10-93
4.3.1.1	Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten, Kota	10-94
4.3.1.2	Kegiatan Peningkatan Jalan Indikator Jasa Konstruksi Kabupaten Daerah Kabupaten, Kota	10-95
4.3.1.3	Kegiatan Pemasok: Sektor Induk Jaringan Jalan Jalan dan Angkutan Jalan (KDA) Kabupaten/ Kota	10-96
4.3.2	Batasan 2: Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Bencana, Indikator Batasan: Pemasok Meningkatkan Perlindungan Kawasan Kawasan Banjir	10-96
4.3.2.1	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Kegiatan Pengelolaan Pemasok pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	10-97
4.3.2.2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terkait dengan Longsor dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10-97
4.3	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Pemasok Peningkatan Daerah	10-97
4.3.1	Program Pemasok Pemasok Pemasok Jalan Lingkup	10-100
4.3.1.1	Program Peningkatan Jalan	10-101
4.3.1.2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	10-102
4.3.1.3	Program Peningkatan Jalan Jalan dan Angkutan Jalan (KDA)	10-103
4.3.2	Program Pemasok Optimalisasi Pemasok Banjir	10-104
4.3.2.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10-104
4.3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	10-106
4.3	Kebijakan Pemasok Pemasok dan Kawasan Kawasan PD Kawasan SDA-SDA melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemasok Daerah	10-108
4.3.1	Kelembagaan Indikator Kinerja Utama (IKU)	10-109
4.3.1.1	Pemasok dan Pemasok IKU dalam Peningkatan Pemasok Pemasok Daerah	10-110

4.3.1.2	Uraian Keberhasilan dan Tuntutan dan Rencana Strategis Peningkat Daerah	70-110
4.3.1.3	Prinsip Penetapan SD yang Baik	70-110
4.3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Rinc Marga dan Sumber Daya Air	70-111
4.3.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik - Daerah Rinc Marga dan Sumber Daya Air Kota Kotam	70-111
4.3.2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Meningkatnya Partisipasi Kemandirian Rantai Rantai - Daerah Rinc Marga dan Sumber Daya Air Kota Kotam	70-112
4.3.3	Tujuan Indikator Kinerja Utama Daerah Rinc Marga dan Sumber Daya Air	70-112
4.4	Kinerja Penguasaan Utama Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2022 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Rinc Marga dan Sumber Daya Air Kota Kotam	70-114
4.4.1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	70-114
4.4.2	Persentase Meningkatnya Partisipasi Kemandirian Rantai Rantai (Kemandirian)	70-115
4.4.3	Tujuan Indikator Kinerja Kunci Daerah Rinc Marga dan Sumber Daya Air	70-116
BAB V	PELAKSANA	70-118
	Lampiran	120

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	0-22
Tabel 2.2 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Golongan	0-23
Tabel 2.3 Tabel Jumlah Pegawai PNS/Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan	0-23
Tabel 2.4 Tabel Jumlah Pegawai PPPK Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Uraan	0-23
Tabel 2.5 Tabel Jumlah Pegawai PNS Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Uraan	0-24
Tabel 2.6 Tabel Jumlah Pegawai PPPK Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Uraan	0-24
Tabel 2.7 Tabel Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Menurut Jabatan	0-25
Tabel 2.8 Tabel Rerata Alan Kuantum Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	0-26
Tabel 2.9 Tabel Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021-2024	0-29
Tabel 2.10 Tabel Realisasi Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2024	0-29
Tabel 2.11 Tabel Survey Kondisi Jalan Kota Batam Tahun 2020-2024	0-29
Tabel 2.12 Tabel Rata Jalan di Kota Batam	0-30
Tabel 2.13 Tabel Realisasi Indikator RPJMD Program Pendidikan Jalan Mantap, Efisien dan Marga tahun 2020 s.d 2024	0-31
Tabel 2.14 Tabel 2.14 Realisasi Indikator RPJMD Program Kegiatan Pendidikan Jalan Mantap Efisien Peningkatan Jalan Utam 2020 s.d 2024	0-34
Tabel 2.15 Tabel Realisasi Indikator RPJMD Program Kegiatan Pendidikan Menanggulangi Jalan Mirip Jalan Perumahan dan Pengayun tahun 2020 s.d 2024	0-38

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Rapor Penyelamatan BP-302 dan REESTRA Dams	1-1
Gambar 1.2 Gambar Peta Rupa Administratif Wilayah KPEPB Kota Batam	1-2
Gambar 1.3 Gambar Peta Jalur Pelayaran Selat Malaka	1-3
Gambar 1.4 Gambar Ringkasan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menurut UU-25 Tahun 2024	1-5
Gambar 1.5 Gambar Alur Hubungan Rantai PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-6
Gambar 1.6 Gambar Alur Hubungan Rantai Peringkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan Fungsi Perencanaan Daerah	1-7
Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi	2-28
Gambar 2.2 Pengontrolan Saat Awal Berdiri Pagi Pegawai BMSDA	2-32
Gambar 2.3 Gambar Kantor dan Workshop Dams BMSDA	2-36
Gambar 2.4 Perencanaan Pemeliharaan Pagar Dams	2-47
Gambar 2.5 Gambar Perencanaan Rupa Jalan Kota Batam	2-30
Gambar 2.6 Gambar Perencanaan Rupa Jalan Kota Batam	2-31
Gambar 2.7 Gambar Perencanaan Perencanaan Jalan Umum	2-33
Gambar 2.8 Gambar Perencanaan Perencanaan Perencanaan	2-34
Gambar 2.9 Gambar Pekerjaan Normalisasi	2-35
Gambar 2.10 Gambar Perencanaan Drainase Kota Batam	2-36
Gambar 3.1 Gambar Alur Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam 2023-2024	10-11
Gambar 3.2 Gambar Alur Keterkaitan antara Misi pembangunan Kota Batam tahun 2023-2028 dengan Kota Baru	10-18
Gambar 3.3 Gambar Rantai Rantai PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2-38

Gambar 3.4	Gambar Diagram Kerangka Keterkaitan Sektor: PKH2 Dengan Tujuan Rasteri	32-33
Gambar 4.1	Gambar Diagram Alir Pendanaan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rasteri Diast-Era Marga Dan Sumber Daya Air Kota Serang	33-43
Gambar 4.2	Gambar Penanganan Jalan	34-100
Gambar 4.3	Gambar Penanganan Jalan	35-101
Gambar 4.4	Gambar Penanganan Jalan	36-102
Gambar 4.5	Gambar Penanganan Penanganan Jalan Umum	37-103
Gambar 4.6	Gambar Pelayanan Pemeliharaan Sungai	38-104
Gambar 4.7	Gambar Pelayanan Pemeliharaan Sungai	39-106
Gambar 4.8	Gambar Pemeliharaan Drainase	39-107

KABUPATEN PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Sumatra (BBS). Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Mayoritas Kota Kepulauan dan Cemerlang Bepi Kota Batam. Pada tahun 2004 berdasarkan Kota Batam menengah, jumlah penduduk sebesar 1.278.820 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.233,98 jiwa per km², serta rata-rata rumah keluarga sebesar 102,00.

Kota Batam mempunyai luas 1.024.752 (satu juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua hektar) yang terdiri dari 464 pulau-pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni diantaranya pulau karang, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah pemerintahan negara. Wilayah Kota Batam dibagi menjadi 12 kecamatan terdiri dari 64 kelurahan.

Kawasan administrasi Kota Batam terbagi-bagi dengan:

- Sebelah Utara : Selat Singapura dan Singapura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bontolung, Kabupaten Langkat
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumatra dan Utara Kabupaten Sumatra
- Sebelah Timur : Kecamatan Bontolung Utara, Kabupaten Bontolung dan Tanjung Pinang

Kota Batam memiliki lokasi geografis yang sangat strategis, berada di jalur pelayaran internasional di Selat Malaka, salah satu jalur laut terpadat di dunia. Batam terletak di Kepulauan Riau, dalam daerah Singapura dan Malaysia, yang menjadikannya pusat perdagangan, industri, dan logistik yang penting.

Gambar 1.1: Rapat Perencanaan RPJMD dan RENCANA Dinas



Gambar 1.2. Peta Peta Batas Administrasi Wilayah KPRW Kota Batam



Sumber : Data DPTD dan BKK

Kawasan gergas, Batam merupakan bagian dari kawasan Rempu Pertambahan Indonesia-Malaysia-Singapura (Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle) (IM-SGT), yang sama-sama menyadari ini di gigit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui integrasi ekonomi antar tiga negara tersebut. Akibatnya Batam dengan Belau Malaka memungkinkan akses yang mudah ke para pelancong internasional yang mengunjungi Asia Timur dengan Jepang, Timor Tengah, dan Afrika, menjadikan kota ini sebagai pintu perantara perdagangan global.

Salah satu prioritas, Kota Batam berambisi menjadi kawasan industri dan logistik yang maju. Untuk itu juga menarik investasi asing terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Akses cepat ke pelabuhan internasional serta infrastruktur yang mendukung seperti pelabuhan kargo dan bandara internasional semakin memperkuat Batam sebagai pusat logistik dan distribusi.

Dengan posisinya yang berada di jalur pelayaran internasional, Batam mengunggul posisinya sebagai salah satu pasar global dan menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia.

Gambar 1.3. Peta Jalur Pelayaran Sekeloa Melaka



Sumber: www.sukcessmelaka.com

Seperti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan ini secara resmi menetapkan bahwa Wali Kota Batam akan menjabat sebagai wali kota Ketua EP Batam. Ini berarti Wali Kota Batam akan memiliki juga mewakili EP Batam juga harus memiliki mekanisme pengangkatan terpisah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengharmonisasikan kebijakan dan strategi antara pemerintah daerah (Pemerintah Daerah) dengan EP Batam, yang sebelumnya sering kali berjalan terpisah atau bahkan bertentangan dalam hal peraturan, tata ruang, dan pengalihan kawasan. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020, Dikpro ini menetapkan kembali batasan dalam PP Nomor 62 Tahun

2018 dan mengatur pemerintahan lebih lanjut terkait peran an resmi Keras BP Badan siah Wali Kota Batam. Dalam Keputusan ini, Wali Kota Batam diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Keuangan Pertanggung Jelang dan Pelaksanaan Keras Batam, yang mencakup bidang pemenuhan, pengelolaan lahan, investasi, dan infrastruktur.

Dengan dilaksanakannya Wali Kota Batam dan wali Wali Kota Batam pada 20 Februari 2018 maka sejak saat tugas kepala daerah sesuai dengan Pasal 64 dan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memimpin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD yang disusun terakut lebih salama dan dilaksanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2024 yang sebelumnya memuat Ane Dik sebagai een Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2018-2024 untuk memantapkan kesinambungan pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2020-2025 dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan penyusunan Rencana Pertanggung Jelang Tahun 2020-2025.

Untuk melaksanakan urusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan terlaksana Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Pertanggung Jelang Tahun 2020-2025, Rencana strategi Pertanggung Jelang adalah dokumen perencanaan, Rencana Kerja Pertanggung Jelang adalah rencana 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Rencana Kerja Pertanggung Jelang serta berdasarkan keputus RPJMD dan berbagai indikator, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2020-2025 menjadi landasan

Salah satu aspek organisasi yang harus dimiliki perusahaan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai tersebut, maka seluruh aparatur Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air Kota Bojone harus memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan, yang bertujuan agar Pembangunan Infrastruktur dapat terlaksana sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan.

Kemampuan dan kedisiplinan adalah hal yang paling penting dalam bekerja sama. Pelaksanaan berdasarkan nilai yang telah ditetapkan, disiplin kerja manajemen dalam bentuk disiplin diri adalah dari kondisi yang ada, baik dari harmonis atau tidak dalam yang dominan dalam format analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menghasilkan beberapa strategi yang lebih lanjut.

Kemampuan dan kedisiplinan adalah sebagai persyaratan dari nilai, nilai dan program pembangunan Pembangunan Daerah, berkolaborasi serta dengan APBD, APBD dan APBD. Kemajuan Pembangunan Daerah juga merupakan program yang akan dilaksanakan pembangunan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan menjadi rencana APBD.

Hasil pembangunan pembangunan daerah selanjutnya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan pemerintahan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rencana pembangunan daerah merupakan bagian yang selanjutnya dengan pemerintahan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Selanjutnya Rencana pembangunan daerah harus melibatkan dan menyelaraskan antara pembangunan daerah yang merupakan keterkaitan dan keterkaitan antara pemerintahan, pembangunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Untuk hal lainnya dengan sistem keuangan yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dengan berpedoman pada dokumen APBD kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk setiap tahunnya yang dijabarkan pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Daerah sebagai masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKAPD) Kota Bojone.

Gambar 1.5. Hubungan Riset PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana ini diuraikan secara terperinci dalam sistem Riset Peningkat Daerah dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan dari Riset peningkatan daerah, serta perencanaan berbagai daerah.

Gambar 1.6. Hubungan Riset Peningkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pada Tingkat Pusat Hingga Daerah



1.2. Design Solution

Salah satu pengurus Pemuda Desa Bina Warga dan Sumber Daya Air Kota
Resam Teluk, 2024 - 2029, mendeskripsikan bahwa proses pemilihan adalah :

1. Vending Machine (VU)

1. Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palohara, Kabupaten Raha Maja, Kabupaten Raha Mui, Kabupaten Raha, Kabupaten Karaman, Kabupaten Nuhuna, Kabupaten Damaru Bagingi, dan Kota Paniai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Palohara, Kabupaten Raha Maja, Kabupaten Raha Mui, Kabupaten Rik, Kabupaten Karaman, Kabupaten Nuhuna, Kabupaten Damaru Bagingi, dan Kota Paniai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6886).
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967).
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Jalan (UU umum yang mengatur penyelenggaraan jalan, termasuk fungsi, status, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan).
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Jalan (Perubahan untuk memperkuat aspek penyelenggaraan jalan, pemeliharaan, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah).
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Jalan (UU No. 2 Tahun 2022) (Meningkatkan kelengkapan jalan termasuk desain jalan, PJJ sebagai kelengkapan jalan).
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pemukiman Rakyat (Desain sebagai bagian dari pemukiman dasar manusia).
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perumahan dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Desain berdimensi dengan pengendalian harga, pemukiman, dan daya dukung lingkungan).
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Kerangka kerja dalam pengendalian dan pengembangan sistem manusia).

peristeen. Kerangka pusat dan daerah terkait pemerintahan tidak dan seluruh. Semua kerangka meliputi NU).

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retensi Daerah (Mengenai Pajak Penjualan Atas PPA) sebagai salah satu TAD untuk mencapai NU).
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Mengenai dasar hukum baru, mengatur konservasi air, pembangunan tidak seluruh dan lingkungan).
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemukiman Rong (Meningkatkan tidak sebagai bagian dari proses pembangunan baru dalam baru ruang).
18. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (Dasar hukum pengelolaan energi, termasuk sistem energi, mengatur penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, termasuk untuk layanan umum (PLU)).

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peringkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peringkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Gerakan Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6262).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6312).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemasaran Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632 *Disamping berada dalam ranah infrastruktur ruang kota*).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jalan yang mengatur detail status, fungsi, penyelenggaraan, serta pembinaan jalan, Dinas dan PJU sebagai bagian tak terpisahkan jalan).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Jasa Konstruksi (Terdapat bab khusus pembangunan infrastruktur termasuk jalan).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRN) (Bentuk dan cara bagian dan prosedur wilayah).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Drafter berkaitan dengan pengendalian daya dalam lingkungan).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Tata Penataan (Cara transfer dapat mencakup infrastruktur termasuk RUI).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Muka Negara (Drafter (RUI) sebagai aset muka daerah).
18. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Drafter dalam penyediaan listrik untuk RUI).
19. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Mangrove lingkungan efisiensi energi pada penggunaan listrik, termasuk sektor perumahan jalan).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Bentangan (Menera sistem tentang perencanaan, pembangunan, pengelolaan tanah dan bentangan).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Bangun (Mangrove penerapan program termasuk wilayah sebagai bagian dari sistem Bangun).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Daerah Daya dan (Mangrove penerapan air termasuk wilayah dan wilayah untuk kepentingan publik & tanah).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Waduk/teknik terkait dengan daya dalam lingkungan dan pengendalian daya).
24. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Nagari di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaga Nagari Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72).
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Nagari Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Nagari Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140).
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Peringatan Hari dan Pelaksanaan Hari Tahun, Bulan, dan Tahun (Lembaga Nagari Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140).

27. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19).

28. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penguatan Penguasaan Ketahanan Ekonomi.

1. Peraturan Menteri (Permen)

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Produk Hakasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Produk Hakasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 127).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengujian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Katalisasi, dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

7. Peraturan Menteri PU/R Nomor 16/PM/2011 tentang Pedoman Penetapan Tenggul Jalan (Mengatur tinggi jalan untuk lintasan, lebar, lajur, dan lain-lain);
8. Peraturan Menteri PU/R Nomor 20/PM/2011 tentang Pedoman Penetapan Status Jalan (Mengatur status jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan lain-lain);
9. Peraturan Menteri PU/R Nomor 3/PM/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Pedoman teknis penyelenggaraan jalan oleh pemerintah kabupaten/kota);
10. Peraturan Menteri PU/R Nomor 11/PM/2010 tentang Tata Cara Penetapan Rata Jalan Selang Jalan Nasional (Pedoman penetapan dan perubahan rata jalan nasional);
11. Peraturan Menteri PU/R Nomor 12/PM/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Dendaan Pedoman (Regulasi umum penyelenggaraan sistem penertiban pelanggaran, pelanggaran, operasi, dan pemeliharaan);
12. Peraturan Menteri PU/R Nomor 17/PM/2010 tentang Bantingan dan Pengendalian Rongga (Regulasi umum sistem pemeliharaan, pengalihan, dan penanganan bantingan kendaraan dengan sistem pengendalian rongga terpadu);
13. Peraturan Menteri PU/R Nomor 42/PM/2007 tentang Pedoman Teknik Perawatan Jalan Umum (Standar teknis perawatan PU, pemeliharaan, dan operasi, pemeliharaan);
14. Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi (Mengelompokkan pengguna energi 50.000 kWh) maksimum manajemen energi, sistem dengan pemerintah daerah yang melebihi 500);
15. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Energi Energi Minimum (ENEM) dan Label Tenaga Energi untuk Lampu (Mengukur standar efisiensi lampu hemat energi termasuk LED);
16. Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2004 tentang Peningkatan Lampu dan Peralatan Lampu Pijar (Urutan penggunaan lampu hemat energi dan LED);
17. Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Tata Cara Penetapan Harga Listrik (Mengatur tarif listrik untuk penggunaan jalan umum);

12. Peraturan Menteri PUU Nomor 04/PRT/II/2021 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Entang Klaua sebagai perantara pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan entang.
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 tahun 2024, Tentang Perubahan ke 4 atas atas peraturan Menteri Perekonomian no 7 2021, tentang peraturan dasar proyek strategi Nasional.

4. Keputusan Menteri (Keputusan) dan Instruksi Menteri (Instruksi)

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 621/KPTS/II/2009 tentang Pedoman Penetapan Pagar Jalan (Pedoman teknis untuk menetapkan lebar jalan pagar jalan).
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 515/KPTS/II/2007 tentang Penetapan Status Jalan (Pedoman awal untuk menetapkan status jalan sebelum diperbaiki dengan Paving).
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 77/KPTS/II/2006 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Jalan (Pedoman teknis untuk penyelenggaraan jalan).
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 242/KPTS/II/2004 tentang Pedoman Teknik Jalan Kelapasan (Instruksi teknis untuk jalan kelapasan).
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 238/KPTS/II/1997 tentang Pedoman Perencanaan Drainase Perumahan (Instruksi teknis lama yang sudah banyak dipakai).
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 518/KPTS/II/1995 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Perumahan dan Drainase Perumahan (Pedoman teknis detail sistem drainase perumahan).
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 667/KPTS/II/2009 tentang Pedoman Teknik Penetapan Jalan Umum (Mengganti aturan sebelumnya dengan teknis lebih detail).
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/II/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUM) sebagai indikator pelayanan dasar perkotaan).

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penertangan Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah (Pedoman kewenangan daerah dalam P3U).
10. Keputusan Menteri ESDM Nomor 0002 K/31/KEPM/2009 (Menganjurkan efisien energi lampu jalan).
11. Keputusan Menteri ESDM No. 143E/30/KEPM/2019 tentang Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tenaga Negeri Energi Lampu LED.
12. Keputusan Menteri ESDM No. 1907 K/30/KEPM/2012 tentang Program Konservasi Energi Nasional.
13. Keputusan Menteri PU Nomor 30/KEPB/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Rambu-rambu (untuk teknis operasi dan pemeliharaan wajib/keharusan).
14. Keputusan Menteri PU/PB Nomor 472/KEPB/M/2016 tentang Sistem Teknis Rambu-rambu (Standar teknis rambu-rambu, rambu-rambu, dan aplikasi perkotaan).
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan P3U dan Revisi Penertangan Daerah Tahun 2019-2028.

5. Standar Nasional Indonesia (SNI)-dan Pedoman Teknis

1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391.2000 tentang Spesifikasi Penertangan Jalan Umum;
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391.2000 (revisi) tentang Penertangan Jalan Umum - Spesifikasi Kinerja - mengatur tingkat penertangan, efisiensi energi, dan biaya energi;
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391-2:2003 tentang Penertangan Jalan - Bagian 2: Metode Pengukuran dan Evaluasi Kinerja;
4. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7391-3:2003 tentang Penertangan Jalan - Bagian 3: Tata Cara Perencanaan Jalan;
5. Pedoman Teknis Jalan Kota Marga PU/PB (2011) tentang Penertangan Jalan.

6. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 -

- 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 43);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2015-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2023-2028 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 134);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Unitas Tugas Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Merumuskan Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam didasarkan Visi, Misi dan Program Strategis Kepala Daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2019, berdasarkan dan selarasnya berbagai sebagai dokumen yang mengkomunikasikan berbagai upaya yang ada di lingkungan Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air baik langsung dan tidak langsung, dan juga stakeholder yang ada di Kota Batam untuk jangka waktu lima tahun.

Pengumuman dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2016-2019 dilaksanakan sebagai dokumen perencanaan strategi lima tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan pembangunan dinas dalam bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan serta sumber daya air. Dokumen ini menjadi pedoman utama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2019 serta sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Rencana ini juga dilaksanakan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian pembangunan Kota Batam secara menyeluruh.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2029 adalah:

1. Menunjang pertumbuhan utama kondisi perungkit daerah sebagai dasar parameter pemenuhan dan isi strategi perungkit daerah, sebagai dasar prosedur pembangunan pembangunan daerah 5 Rasi tatanan ke depan sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perungkit daerah serta menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lima rasi dan sumber daya air selama periode 2020-2029 secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.
2. Menyediakan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Batam ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja Lima Rasi Marga dan Sumber Daya Air.
3. Menyediakan elaborasi dan aliansi pengalihan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan pengalihan air, sebagai pertimbangan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan.
4. Menyajikan keterpaduan dan sinergi lintas sektor dan perungkit kepentingan dalam pembangunan infrastruktur, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban maupun evaluasi kebijakan.
5. Menyediakan aksi atau kinerja dalam lima rasi sebagai evaluasi dan pengalihan pembangunan infrastruktur, serta sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (*Renja*) dan perjanjian kinerja.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh perungkit besar dan pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang mendukung terwujudnya Batam sebagai kota modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Berseri) Periode Dua Tahun Marga dan Sumber Daya Air Kota Karam Tahun 2024 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
- 1.3 MANDAT DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PEMANFAATAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Misi PD dalam Peningkatan Pelayanan (jika ada)
- 2.2 PEMANFAATAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.2.1 Pemanfaatan Perangkat Daerah

3.3.3 *Isi Bawahan*

DAS II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN AMAN KEBERHASILAN

3.1 TUJUAN KEMENTERIA PD TAHUN 2023-2025

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIA PD TAHUN 2023-2025

3.3 AMAN KEBERHASILAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIA PD TAHUN 2023-2025

DAS IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KIPERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URURAN

4.1 URAIAN PROGRAM

4.2 URAIAN KEGIATAN

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BERBUTA KIPERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN SUMBU INDIKATIF

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN DAERAH

4.5 TARGET KEBERHASILAN Pencapaian TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIA PD TAHUN 2023-2025 MELALUI INDIKATOR KIPERJA UTAMA (KU) PERANGKAT DAERAH

4.6 TARGET KIPERJA PENYELENGGARAAN URURAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN 2023-2025 MELALUI INDIKATOR KIPERJA KIPRO (KK)

DAS V PENUTUP

DAFTAR PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI STRATEGI PERAWAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Union Tugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, tugas pokok Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Memantau, Membina dan dalam Memelihara, Mengukur, Merencanakan, Membina, Mengembangkan, Mempertahankan dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Teknik Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Berdasarkan Aspek Geometri dan Tugas Pembantuan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai kewenangannya.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi fungsi:

- Perencanaan kebijakan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Kebijakan Union bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Pembinaan dan Pelaksanaan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air disusun sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Bagian Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan dan program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Bina Marga
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Drainase
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pengendalian Bangun, Pemori dan Waduk
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- d. Raking Pemasangan Jalan Umum
 12. Kelompok Jurusan Pengecatan
 e. Unit Pekerjaan Teknis

Section 2.1. STUDENT ORGANIZATION



2.2. Jumlah Dams, Dams With Wings Dan Jumlah Dams Per Kats Wilayah

2.2.1. Number Data Memoirs

2.2.1.1. Wapenpositionen

Sumber Daya Manusia yang dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur, merupakan unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintah dan memegang peranan utama dalam melaksanakan dan menjalankan kebijakan organisasi pemerintah untuk mencapai target dan sasaran Dinas.

Tujuan Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi mencapai insentif pertama tahun 2018 sehingga akan Penerima Denda Maksimal (SDM) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 76 (tujuh puluh enam) Tawaran Honor Lepas (THL). Untuk hal tersebut pemerintah DKI Jakarta

Daerah Hutan Mangrove dan Sumber Daya Air Kota Batam didominasi oleh paguron dengan luas wilayah pendidikan 21 sementara luas wilayah pendidikan PPTK di dominasi oleh SMA selanjut.

Gambar 2.3. Paguron Hutan Apal Samin Pagi Paguron Hutan



Paguron yang bertugas di lingkungan Dinas Hutan Mangrove dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Paguron Dinas Hutan Mangrove dan Sumber Daya Air
(Dep 2020)**

No.	Unit Kerja	2019			2020		
		P	P	PPTK	P	P	PPTK
1	Dagub Kalurahan	11	0	00	0	0	0
2	Stasiun Hutan Mangrove	15	3	18	10	0	0
3	Stasiun Perikanan Jalan Duren	0	0	10	00	0	10
4	Stasiun Perikanan	7	0	10	10	0	10
5	Stasiun Perikanan Manti, Waduk dan Perikanan	11	0	18	40	0	40
	Total	44	3	73	10	0	10

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air Kota
Bontas Menurut Golongan (Jag 2020)

No	Jenis Golong	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Dagun Sakawonot	0	27	0	
2	Wiang Eten Marga		27	1	
3	Wiang Penangkang Jalan Umum	1	0		
4	Wiang Urutuan		20	1	
5	Wiang Jangpokat Bontas, Wotok dan Pental	1	12		
	Total	2	85	2	

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai PNS Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bontas Menurut Tingkat Pendidikan (Jag 2020)

No	Jenis Golong	SL		D1		SMA	
		L	P	L	P	L	P
1	Dagun Sakawonot	2	0	2	0	0	1
2	Wiang Eten Marga	1	0	11	2	2	0
3	Wiang Penangkang Jalan Umum	1	0	2	1	2	0
4	Wiang Urutuan	2	0	2	4	0	0
5	Wiang Jangpokat Bontas, Wotok dan Pental	1	0	0	2	1	0
	Total	10	0	24	10	10	1

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai PPK Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air
Kota Bontas Menurut Pendidikan (Jag 2020)

No	Jenis Golong	SL/SLT		SMA		SMP/SM	
		L	P	L	P	L	P
1	Dagun Sakawonot	1	0	2	1	0	0
2	Wiang Eten Marga	2	0	7	0	0	0
3	Wiang Penangkang Jalan Umum	1	0	10	0	0	0
4	Wiang Urutuan	4	0	12	1	0	0
5	Wiang Jangpokat Bontas, Wotok dan Pental	2	1	17	1	4	0
	Total	10	0	34	4	0	0

**Tabel 2.5 Jumlah Paguron P3T Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air
Kota Batam Menurut Telo. (Sep 2020)**

No.	UML Marga	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dagang Sejahtera	0	1	0	0	1	1
2	Ekolog Dina Marga	2	0	0	1	0	0
3	Ekolog Pangelegan Jalan Tolong	1	1	0	3	-	1
4	Ekolog UGA / Ekolog Dinelegan	0	-	-	4	3	-
5	Ekolog Pangelegan Bakti, Waduk dan Pange	1	1	1	0	-	1
	Total	10	13	00	20	4	0

**Tabel 2.6 Jumlah Paguron P3T Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air
Kota Batam Menurut Telo. (Sep 2020)**

No.	UML Marga	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dagang Sejahtera	0	0	1	0	1	-	-
2	Ekolog Dina Marga	0	0	0	-	0	0	-
3	Ekolog Pangelegan Jalan Tolong	1	11	0	3	1	3	-
4	Ekolog UGA / Ekolog Dinelegan	0	0	1	0	1	4	-
5	Ekolog Pangelegan Bakti, Waduk dan Pange	10	1	0	0	0	1	0
	Total	10	12	01	03	02	08	0

2.2.1.3. Jumlah Pamanahan Kebutuhan Paguron Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil analisis kapegunan teknis, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan paguron di Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air saat ini masih terpendek secara optimal. Kevlaan ini dikarenakan keterbatasan strategy penataan HDM yang telah dilakukan, sehingga format jabatan yang ada dapat terisi dengan baik.

2.2.1.3. Jumlah Pangelegan etek Teknis

Pamanahan kebutuhan ini terdapat maras di berbagai bidang, baik pada jabatan fungsional maupun teknis yang terdapat untuk operasional dinas. Sebagai contoh, pada pada bidang seperti Teknik Jalan dan Jembatan, Abk Oastalnik dan Pangelegan Sumber Daya Air telah memiliki jumlah paguron yang sesuai dengan beban kerja. Keterbatasan tenaga abk yang memadai ini sangat

total dalam membangun pemerintahan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta pengelolaan sumber daya air terjamin efektif.

Dengan jumlah pegawai yang memadai, Dinas Rira Marga dan Sumber Daya Air dapat melaksanakan program-program strateginya dengan lebih efisien, mulai dari pembangunan infrastruktur baru, perbaikan jalan, hingga penanganan banjir, reklamasi sungai, dan air bersih.

2.2.1.8. Implikasi Kinerja dan Efisiensi

Kandis ini memberikan dampak positif pada kinerja dan secara keseluruhan. Teknik adanya pelaksanaan pegawai beserta tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara merata, pengawasan lebih kerja terdapat pada individu, dan meningkatkan produktivitas tim. Hal ini juga berdampak pada kualitas layanan publik yang lebih baik, karena setiap proyek dan program dapat selesai dan diserahkan oleh tenaga profesional yang kompeten dalam jumlah yang cukup.

Selain umum, studi ini menunjukkan bahwa siklus SDM di Dinas Rira Marga dan Sumber Daya Air telah mencapai titik ini, di mana jumlah pegawai sejalan dengan kebutuhan operasional dan visi pembangunan daerah.

Tabel 2.7. Tabel Jumlah Pegawai Dinas Rira Marga dan Sumber Daya Air Kota Dairi Menurut Jabatan (Jep 2025)

No.	Jabatan	ENK	SPUR	Total
1	SEKRETARIS	1		1
2	SEKRETARIS	2		2
3	SEKRETARIS	1		1
4	ST ASISTENSI	12		12
5	ST ASISTENSI	1	17	18
	TOTAL	21	17	39

Keterbatasan data SDM operator Dinas dalam kemampuannya dengan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Rira Marga dan Sumber Daya Kota Dairi secara umum jumlah sudah mencapai namun kualitas masih kurang memadai. Untuk itu peningkatan kompetensi, keterampilan, keahlian dan keprofesionalan sumber daya operator dalam bidang infrastruktur pelayanan umum sangat diperlukan dalam rangka untuk peningkatan kinerja Dinas.

Salah satu pelaksanaan tugas Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam memfasilitasi sarana dan prasarana penyalangan. Saat ini Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengelola beberapa sarana.

3.3.3. Sarana Prasarana Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air

Sesuai Peraturan Menteri PUPH dan PIR baru berlatar belakang sarana prasarana, meliputi pemukiman, transportasi, bangunan, masih banyak dibutuhkan.

Gambar 3.3. Gambar Kantor dan Workshop Dinas KMDA



Adapun Kebutuhan Sumber Daya Perumahan Terserak Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sudah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dengan siklus kerja telah diberikan ini:

Tabel 3.5 Tabel Sarana Alokasi Kota Marga Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No	Sifat dan Maksud	Luas Bangunan	Tinggi	Kondisi		
				Luas	Kondisi Bangunan	Sal
1	Taman Rekreasi Kota	18.828	4,7	Y		
2	Bangunan Gedung Kantor	3	4,4	Y		
3	Salu Benda	22	10,7	Y		
4	Salu Benda	136	10,2	Y		
5	Bangunan Kota A	18	4,4	Y		
6	Bangunan Kota B	1	10,7		Y	
7	Salu (Pengaliran Sungai)	47	10,2	Y		
8	Bangunan	17	10,2	Y		
9	Waduk	32	10,4	Y		

3.2.2.1. Kondisi Keseluruhan Barisan dan Pemrosesan Deras Rins Harga dan Sumber Daya Air

Untuk mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik Dinas Rins Harga dan Sumber Daya Air menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi efektivitas operasional, terutama dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan pengalihan sumber daya air di wilayah berya.

Gambar 3.4 Sumber Perbaikan Pendukung Teyakasi Dinas



Excavator



Backhoe Loader



Vibro Roller



Motor Grader



Sky lift



Motor Boat



Kendaraan Dinas



Dump Truck

3.2.2.2. Dukun Kesehatan Dinas dan Pemrosesan Masalah

Berikut ini, uraian mengenai jemaat sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas layanan dan administrasi.

- **Kandungan Operasional:** Keberhasilan armada menjadi jaminan utama.
 - Memastikan armada baru difungsikan untuk pemeliharaan dan pengurusan jalan di area yang sulit dijangkau, memastikan kondisi jalan dan jembatan, Drainase, Penerangan Jalan Umum (PJU) selalu dalam kondisi baik serta survey dan memastikan kondisi busi.
 - Kandungan armada sangat diperlukan untuk menunjang beban kerja wilayah untuk dan harus sama sehingga tim bisa melaksanakan tugasnya untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan pemeliharaan sarana.
 - Dumptruck sangat penting untuk mengangkut material saat ada perbaikan jalan dan leading area jalan normalisasi.
 - Speedster diperlukan untuk pengurusan dan pemantauan pemeliharaan PJU, Pemeliharaan wilayah di wilayah jalan area kawasan.
- **Manajemen dan Ruang Kantor:** Fasilitas kantor & kantor mobil penting memadai.
 - Meja, kursi, lemari arsip, dan perlengkapan lainnya tidak terlupakan, sehingga menghambat kenyamanan dan efisiensi kerja.
 - Koneksi internet ruang kantor juga menjadi hal yang penting karena akan ada banyak hal yang harus diurus yang sangat penting untuk mendukung produktivitas.
- **Peralatan Elektronik:** Keberhasilan peralatan elektronik yang modern masih mahal.
 - Jumlah komputer (PC, laptop, notebook) yang tersedia tidak seluas yang diinginkan jumlah staf. Ditambah lagi peralatan yang ada sudah tidak update. Hal ini menghambat proses administrasi, pelaporan, dan pengalihan data.
 - Kebutuhan akan dana sangat penting untuk survey, pemetaan dan pemantauan kondisi jalan serta uang dari dalam. Dengan dana survey serta pengurusan bisa lebih akurat dan menghemat waktu.

Ketersediaan sarana dan prasarana ini dapat berdampak pada lambatnya respon terhadap laporan kerusakan, berakibatnya akan pengurusan proyek dan hasilnya efisien dalam pekerjaan kantor. Oleh karena itu, pada ada pengadaan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar Dinas bisa bekerja dan Sumber Daya dan dapat bekerja secara optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

3.5 Kinerja Pelaksanaan Perangkitan Bauran

Tinggaya terbagi berdasarkan pendekatan di Kota Batam menggunakan turunan terhadap norma dan prosedur teknis mengenai pola keberagaman teknologi pemrosesan jalan dan jembatan, pemrosesan pengendalian bauran, desain proyek, konstruksi, dan pemrosesan jalan umum.

Tabel 3.8 Realisasi Bauran RPJMD Tahun 2020-2024

Tahun	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Persentase Pemrosesan 1 (persentase Bauran Bauran)	60,00%	61,10%	65,00%	61,77%	70%	100%	62,00%	64,00%	65%	66,20%

Tabel 3.10 Realisasi Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2020-2024

Tahun	Sasaran	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial	60,00%	61,10%	65,00%	61,77%	70%	100%	62,00%	64,00%	65%	66,20%
	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial	60,00%	61,10%	65,00%	61,77%	70%	100%	62,00%	64,00%	65%	66,20%
	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial	60,00%	61,10%	65,00%	61,77%	70%	100%	62,00%	64,00%	65%	66,20%

Tabel 3.11. Tabel Hasil Survei Kondisi Jalan Tahun 2020-2024

No. Tahun	Total RTN	Hasil Survei							
		Jalan		Jalan		Jalan Persegi		Jalan Persegi	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	2020	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00
2	2021	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00
3	2022	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00
4	2023	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00
5	2024	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00	240,10	100,00

3.5.1 Bidang Rinc Marga

Salah bidang infrastruktur jalan, sejak tahun 2024 ruas jalan Nasional dan Ruas Jalan Provinsi sudah tidak ada lagi selanjutnya yang ada di Kota Batam. Ruas jalan Kota sesuai BE Wilayah Batam No 275 Tahun 2024 Tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Tabel Data Ruas Jalan di Kota Batam

No	Ruas Jalan	Panjang
1	Das Ruas Jalan Nasional Menjadi Jalan Kota	100.00 Km
2	Das Ruas Jalan Provinsi Menjadi Jalan Kota	110.00 Km
3	Ruas Jalan Kota	946.16 Km
4	Ruas Jalan Lingkungan Perumahan	314.91 Km
Total		1294.60 Km

Ruas Ruas Jalan Kota dalam termasuk jalan lingkungan Perumahan yang dibangun oleh pihak Developer yang sudah di cetak kemudian ke Pemerintah Kota Batam.

Gambar 2.5 Gambar Penampang Ruas Jalan Kota Batam



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/BJ/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sub Bidang Rinc Marga, 'Jalan untuk wilayah Kelurahan/Kota dengan indikator pelayanan tingkat kondisi jalan

Indragiri, Kota, dalam kondisi mampu mampu dengan 2014 adalah 60 persen. Terkadang target tersebut sudah urusan hingga 70% dan hingga 80% Marga, Jalan telah mencapai target 50% yang diharapkan.

**Tabel 3.12 Tabel Realisasi Indikasi RUMD Program Kegiatan
Pendukung Jalan Marga, Eling Eling Marga
tahun 2020 s/d 2024**

No	Kategori Kegiatan	Tipe Kegiatan Kategori Kegiatan Indikator Kegiatan	Target Realisasi Program dan Kegiatan Kegiatan									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10%	10.00%	10%	10.00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
3	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
4	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
5	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
6	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
7	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
8	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
9	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
10	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
11	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
12	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
13	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
14	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
15	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
16	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
17	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
18	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
19	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
20	Kegiatan Kegiatan Jalan	Pembangunan Jalan yang Marga	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%

Gambar 3.6 Gambaran Peningkatan Jalan Kota Batam



Luas area Panjang Jalan yang dibangun/ditangguhkan (km) selama periode 2021 sampai dengan 2026 telah menunjukkan realisasi yang positif. Adapun pencapaian sampai dengan tahun 2024 total panjang jalan yang dibangun/ditangguhkan sudah mencapai 219,19 km dengan pencapaian sebesar 38 persen terhadap kebutuhan panjang jalan yang dibangun/ditangguhkan pada periode RPJMD 2021-2026.

Gambar 3.7 Gambar Penyelesaian Pemertanian Jalan Umum



2.2.2 Bidang Penertangan Jalan Umum

Saluran untuk Indikator Program jumlah titik lampu (PTL) yang dibangun, selama periode 2021-2024 telah menunjukkan realisasi yang positif. Secara total terkumpul jumlah titik lampu (PTL) yang dibangun, selama periode RPJMD 2021-2024 adalah sebanyak 18.778 titik lampu.

Saluran pencapaian target dengan tahun 2024 total jumlah titik lampu (PTL) yang dibangun adalah sebanyak 1095 Unit, atau dengan pencapaian terdapat keterlambatan sebesar 15,77 persen terhadap keterlambatan jumlah titik lampu (PTL) yang dibangun selama pada periode RPJMD 2021-2024, Selanjutnya Selama periode 2021-2024 seluruh Jumlah Titik Lampu yang direalisasikan di Kota Batam telah terakumulasi sesuai target. Pada indikator program lampu PTL yang direalisasikan pada periode RPJMD 2021-2024 belumlah mencapai

misalnya sebanyak 16.628 unit. Pembangunan lampu RTU di wilayah luar pulau belum dapat terpenuhi sesuai target dikarenakan Keterbatasan Daya TUK pada daerah luar pulau. Untuk Indikator Jumlah Titik Lampu RTU yang Dipelihara di wilayah luar pulau telah mencapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.18. Tabel Realisasi Indikator RSMB Program Kegiatan
Pendukung Jalan Mantap, Bidang Peningkatan Jalan Utama

tahun 2020 s/d 2024

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan dan Realisasi Periode									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Revisi	Revisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Revisi	Revisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Revisi	Revisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan RTU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.5.3 Bidang Perencanaan dan Pengujian

Bidang Perencanaan dan Pengujian sebagai pendukung tugas dan fungsi Dinas dan Satuan Kerja Air memiliki dua Program dan tiga indikator program yaitu Program Pengembangan Jasa Konsultansi Indikator Perencanaan pengujian yang dilakukan, Jumlah Perencanaan dan Uji Rantai dan Jumlah Perencanaan dan Uji Rantai Yang Dipelihara dengan persentase sebagai berikut.

Contoh 2.5 Contoh Peningkatan Perencanaan Pengujian



**Tabel 2.15. Tabel Realisasi Indikator RPJMD Program Kegiatan Pendidikan
Jalan Menteng, Bidang Pendidikan dan Pengajaran 2020 s/d 2024**

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Tipe Sasaran Program (Indikator Kategori Sasaran)	Tahun Pelaksanaan Program dan Indikator Sasaran							
			2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pengembangan dan Peningkatan	Peningkatan jumlah sarana pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pengembangan dan Peningkatan	Peningkatan jumlah sarana pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Pengembangan dan Peningkatan	Peningkatan jumlah sarana pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Pengembangan dan Peningkatan	Peningkatan jumlah sarana pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.16. Tabel Realisasi Indikator RPJMD Program Kegiatan
Pendidikan Meningkatkan Peningkatan Titik Dugul Bidang Pendidikan dan
Pengajaran tahun 2020 s/d 2024**

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Tipe Sasaran Program (Indikator Kategori Sasaran)	Tahun Pelaksanaan Program dan Indikator Sasaran							
			2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pengembangan dan Peningkatan	Peningkatan jumlah sarana pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100

		K. Rasio Konsentrasi Kandungan Kandungan	K. Rasio	K. Rasio	K. Rasio	K. Rasio	K. Rasio	K. Rasio	K. Rasio
1	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
4	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio Kandungan K. Rasio	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Gambar 2.3 Kondisi Fasilitas Normalisasi



2.3.4 Ruang Sumber Daya Air

Penambahan banjir di Kota Batam sesuai dengan kondisi infrastruktur drainase yang ada. Kondisi perkotaan sebagian besar tidak dapat lagi menahan debit air yang masuk ke kota yang disebabkan sebagian drainase, saluran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Batam saat ini dikarenakan perubahan tata guna lahan sesuai rencana yang tidak bisa diimbangi dengan penyediaan infrastruktur drainase kota. Selain itu masih banyak saluran drainase alam yang belum tertata dengan baik sehingga tingkat sedimentasi menjadi tinggi. Ada juga perilaku masyarakat yang sering membuang sampah pada drainase.

Gambar 2.10 Pembangunan Drainase Kota Batam



Untuk membangun lini terasert Deras Bero Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam melalui Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengaliran selama periode RPJMD 2021-2024 sepanjang 22.000 m. Kemudian sudah terasertasi sampai dengan tahun 2022 sepanjang 29.428 m atau dengan tingkat pencapaian sebesar 136 persen terhadap indikator total panjang drainase yang ditargetkan pada periode RPJMD 2020-2026. Selain itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah melakukan pemeliharaan secara berkala dan berkala. Untuk dalam kurun waktu dalam rangka mengatasi daya rusak air laut atau akibat muka Deras Bero Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah melakukan kegiatan pemeliharaan tingkat pemeliharaan pada lokasi terasertasi. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah terasertasi sepanjang sepanjang 222 meter.

**Tabel 3.16. Tabel Rasio Indikator RPJMD Program Kegiatan
Peningkatan Kualitas Pengelolaan TPA Bero Marga dan Sumber
Daya Air tahun 2021 s.d 2024**

No	Kategori Indikator	Uraian Indikator Kategori Indikator Kategori Indikator	Pengukuran dan Analisis Data									
			2018/2019		2019		2020		2021		2022	
			Tercapai	Belum Tercapai	Tercapai	Belum Tercapai	Tercapai	Belum Tercapai	Tercapai	Belum Tercapai	Tercapai	Belum Tercapai
1	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengukuran Keberhasilan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Kategori Indikator Kategori Indikator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.6 Bagian Kesekretariatan

Bagian Kesekretariatan pada Dinas Kesehatan Kota Bantul mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan perlengkapan. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan perlengkapan. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan perlengkapan.

Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan perlengkapan. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan perlengkapan. Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan perlengkapan.

meningkatkan prestasi pemerintahan dan pelayanan program. Dengan tata kelola yang baik, bidang kesehatan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Berau dan Sumber Daya Air sejalan dengan visi pembangunan daerah serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Melalui Program Pemasjng Uraan Pemasalahan Daerah Kabupaten/Kota, kesehatan juga menjadi fasilitator dalam menambatkan kemitraan dan koordinasi antara pimpinan, staf teknis, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan strategi yang solid dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan subsektor kesehatan di bidang jalan dan sumber daya air.

Dengan demikian, Bidang Kesehatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung tercapainya sasaran lainnya daerah, yakni terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Berau. Bidang Kesehatan Kota Berau 2021 sampai dengan tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Berau dan Sumber Daya Air Pemasalahan Kota Berau telah disediakan dalam bentuk:

**Tabel 3.17. Tabel Rincian Indikator RPJMD Program Kegiatan
Program Pemasjng Uraan Pemasalahan Daerah Kabupaten/Kota
tahun 2020 s.d 2024**

No	Kategori dan Subkategori	Indikator Kinerja Utama Bidang Kesehatan dan Kabupaten/Kota	Tingkat Pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	Kelembagaan Dinas Kesehatan Kota Berau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sl. No.	Particulars	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Capital expenditure on Fixed Assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	Acquisition of property Plant and Machinery Furniture and Fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	Acquisition of immovable property	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
13	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
14	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
15	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
17	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
19	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
20	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
21	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
24	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
25	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
26	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
27	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
28	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
29	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
30	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
31	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
32	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
33	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
34	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
35	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
36	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
37	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
38	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
39	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
40	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
41	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
42	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
43	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
44	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
45	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
46	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
47	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
48	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
49	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
50	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
51	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
52	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
53	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
54	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
55	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
56	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
57	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
58	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
59	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
60	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
61	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
62	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
63	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
64	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
65	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
66	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
67	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
68	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
69	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
70	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
71	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
72	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
73	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
74	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
75	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
76	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
77	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
78	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
79	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
80	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
81	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
82	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
83	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
84	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
85	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
86	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
87	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
88	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
89	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
90	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
91	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
92	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
93	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
94	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
95	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
96	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
97	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
98	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
99	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
100	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
101	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
102	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
103	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
104	Acquisition of plant and machinery	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
105	Acquisition of furniture and fittings	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
106	Acquisition of other assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
107	Acquisition of land and building	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
108	Acquisition of plant and machinery	1000	1000								

No	Indikator Keberhasilan	Indikator Keberhasilan yang diukur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Gambar 3.11 Gambar Rapor Evaluasi Kinerja



**Tabel 3.12. Tabel Realisasi Nilai Sahip Dinas Sisa Marga Dan Sumber
Daya Air Kota Batam tahun 2020 s/d 2024**

No	Tahun	Nilai Sahip	Kemungkinan
1	2020	0,0	0,0
2	2021	0,0	0,0
3	2022	78,41	Batas Bawah
4	2023	98,37	Batas Bawah
5	2024	112,7	Batas Bawah

**Tabel 3.13. Tabel Realisasi IRI dan IRI Dinas Sisa Marga Dan
Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2020 s/d 2024**

[illegible]

2.4. Mince 7D dalam Pembuatan Pelyongan

Selain menjelaskan tugas dan fungsi serta menghubungkan kualitas informasi dari berbagai keberagaman lingkungan, Dinar Nura Marga dan Sumbar Daryo di Kota Batam telah dapat bekerja sesuai. Eksplorasi energi dengan berbagai cara strategi agar pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. Komunitas dalam manajemen jalan dalam bentuk sumber dan perkembangan masyarakat terhadap dunia.

Telam apura mawajjima jaha dahan baddhi mastap, Dama Bha
Mama den Bumar Dama den hamra danga barabari abhi, mawa jaha

1. Kementerian perhubungan melalui berbagai lembaga, seperti, serta program pembangunan jalan nasional maupun provinsi yang terintegrasi dengan jalan lain;
2. Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BJN), BPN, khususnya dalam pelaksanaan jalan eks nasional untuk pendanaan pembangunan jalan baru dan pembangunan infrastruktur jalan;
3. BP Jalan, terkait pemetaan jaringan, sistem informasi perhubungan, serta penyediaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan untuk infrastruktur jalan eks jalan nasional dan eks jalan provinsi;
4. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan: KPR, khususnya dalam pelaksanaan jalan eks Jalan Provinsi untuk pendanaan pembangunan dan pembangunan infrastruktur jalan eks jalan provinsi;
5. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam pemetaan aliansi lahan untuk jalan mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
6. Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan (PERKUMTAN) dalam pemetaan jalan lingkungan;
7. Perwakilan konsultan dan lembaga dalam perencanaan, pengurusan pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
8. Akademisi dan lembaga penelitian yang memberikan rekomendasi ilmiah mengenai bentuk teknologi material dan metode pembangunan jalan yang lebih efisien dan ramah lingkungan;

4. Masyarakat sebagai pengguna jalan yang berperan dalam memberikan masukan, pengawasan, dan menjaga keada pembangunan.

Sementara itu, dalam perkembangan masyarakat terdapat banyak, Dikot Kota Ilirya dan Sumbar Daya juga membangun kelurahan dengan:

1. Dalam Wilayah Ruang dan Kemantoran RUPR, khususnya dalam pengendalian hampir skala besar dan pembangunan infrastruktur pengendalian hampir;
2. SD Sistem, terkait peraturan hukum, sistem dimana politisasi, serta penyediaan lahan untuk infrastruktur pengendalian hampir;
3. Dalam Kebijakan Umum Perumahan KPR, khususnya dalam pelaksanaan yang menjadi pembangunan Perumahan untuk pemukiman pemukiman dan pembangunan infrastruktur ruang, jaringan, pengisian ulang pondasi dan pemukiman kembali;
4. Dalam Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pemukiman adalah lahan drainage mulai dari Respona Tata Ruang Wilayah RTW dan Respona Dasi Tata Ruang (RDR);
5. Dalam Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pemukiman (PERAKIMTA) dalam pemukiman Dimana lingkungan;
6. Dalam lingkungan hidup, dalam pengendalian skala skala ruang (GAR), ruang terbuka hijau, serta konservasi lingkungan yang berkeadilan sebagai skala respon air;
7. Perencanaan kawasan dan kawasan dalam pemukiman, pengendalian pemukiman, serta pengembangan pemukiman dan pemukiman kawasan dan pengembangan hampir;
8. Akademisi dan lembaga penelitian yang memberikan rekomendasi untuk membangun norma teknologi material dan metode pembangunan dan pemukiman kawasan dan pengembangan hampir yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
9. Masyarakat dan komunitas lokal, yang berperan aktif dalam menjaga keberagaman lingkungan, salutan kawasan, serta mengungkap potensi pembangunan skala wilayah.

Dengan dukungan yang akan terakumulasi, Dikot Kota Ilirya dan Sumbar Daya dan Kota Dalam dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, sebagai pemukiman pemukiman masyarakat dan risiko bencana hampir. Sehingga ini diharapkan dapat mempengaruhi terwujudnya Kota Dalam yang modern, aman, nyaman, dan berdaya tanggap.

3.6. Pemenuhan Dan Isi Strategi Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air

3.6.1. Pemenuhan Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air

Kota Batam merupakan kota dengan pertumbuhan pesat di sektor industri, logistik, dan perdagangan. Pertiga perkebangan ini, Belum Optimalnya Pemasangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, menjadi palang pintu utama bagi Pemenuhan Kota Batam terutama infrastruktur terhadap infrastruktur jalan yang mantap dan sistem pengendalian banjir yang unggul menjadi masalah mendasar. Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam memiliki mandat strategis dalam membangun serta menjaga kualitas jalan sepanjang 1234,18 Km dan mengurangi tingkat banjir yang terjadi pada waktu tertentu di kawasan sebanyak 185 titik yang berada pada 31 sistem drainase dengan luas 66,21 Hektar pada baseline awal. Namun, upaya pencapaian target ini tidak mudah berbagai hambatan yang bersifat teknis, finansial, dan sosial menghambat dari survey awal hingga pelaksanaan pengumpul data dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam

3.6.2. Isi Strategi Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air

Pengaliran infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, terutama berkaitan terhadap infrastruktur jalan yang mantap dan sistem pengendalian banjir yang unggul untuk melindungi masyarakat dari dampak banjir yang unggul menjadi masalah mendasar, untuk mengoptimasi serta memaksimalkan pemenuhan isi Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam perlu mengartikan strategi pertama kegelimasan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan, kedua Meningkatkan Infrastruktur Kanal Banjir dan Drainase serta Pemeliharaan Sungai dan Drainase

3.6.2.1. Pemenuhan dan Hambatan

3.6.2.1.1. Pemenuhan Belum optimalnya pembangunan infrastruktur palang pintu utama

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur palang pintu utama di Kota Batam masih terlihat pada urusan jalan dan pengaliran banjir. Pada sektor jalan, tingkat kemiringan jalan belum sepenuhnya tercapai dan kelengkapan sarana jalan seperti marka, median, trotoar, drainase jalan, serta pemasangan jalur umum masih terbatas. Hal-hal ini mengurangi kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan melintas masyarakat. Sementara itu, pada urusan banjir, pembangunan yang ada belum mampu mengatasi permasalahan genangan dan banjir secara menyeluruh.

Menghantapi tantangan infrastruktur jalan dan banjir memajukan karya lokal dan via jangka panjang. Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam memiliki peran penting untuk keberhasilan upaya ini juga unggul

berperan pada kemajuan pembangunan, perbaikan masyarakat, serta kesejahteraan kehidupan satu ruang. Dengan pembangunan yang tepat dan terarah, diharapkan jumlah titik tumbuh dapat berkembang signifikan, serta tercapai target besaran jalan menuju yang mendukung pemerataan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam memantapkan daya saing global, selain sumber daya manusia, sumber pemerintah dan efisiensi waktu. Dengan demikian tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan dengan biaya semakin baik dalam rangka membangun infrastruktur Kota Batam yang modern.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk namun belum disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang layak dan memadai, akan memunculkan berbagai permasalahan pada masyarakat seperti kemacetan lalu lintas, banjir dan lainnya. Selain itu, keberadaan infrastruktur masih belum sesuai dengan pembangunan nasional dan internasional.

Adapun dari sisi kuantitas aspek human yang juga tidak kalah penting dalam pembangunan infrastruktur ialah Tenaga Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Kondisi saat ini masih dirasakan belum berjalan secara optimal, sehingga dalam beberapa tahun terakhir pembangunan sumber daya pengelompokan koordinasi dalam sektor pembangunan dengan memanti terkait koordinasi perlu dikembangkan lagi kemampuan sebagai akan memanti dan memantapkan pembangunan infrastruktur di Kota Batam. Selain itu juga ditemui permasalahan infrastruktur yang berkualitas memanti aspek pemerataan teknologi dan aspek pengalihan yang mempengaruhi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Untuk meningkatkan pelayanan dan layanan Penanagiat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dibutuhkan peningkatan kompetensi dan keahlian terutama Widyag Teknik dan administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan hal penting yang harus dipantau kedepannya. Dengan adanya peningkatan kompetensi dan keahlian tersebut diharapkan pelayanan dan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam akan lebih optimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai target dan sasaran dinas dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya.

Tantangan pemeliharaan infrastruktur pelayanan umum ke depan juga akan terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang bertujuan

memenuhi kebutuhan jaringan tanpa mengorbankan pemertahan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek-aspek lingkungan (manajemen sumber daya lingkungan manusia agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Tantangan utama lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang pelayanan umum adalah belum terakuisisinya dana yang cukup dan keberlanjutan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi hal ini Dinas Renc. Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah melaksanakan kerjasama dengan swasta terkait juga mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk bidang infrastruktur yang tidak hanya melalui anggaran APBD Kota juga dimatikan melalui dana APBD Provinsi dan APBD serta dana transfer lainnya yang dalam hal-hal tertentu ini menjadi masukan untuk kita.

Formasi pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana menjadikan kawasan infrastruktur yang berkualitas yang harmonis dengan lingkungan dengan infrastruktur pelayanan yang modern serta pemertaan pemukiman yang ramah, aman dan nyaman. Selain itu untuk pemertaan pembangunan juga perlu melakukan partisipasi pembangunan melalui berbagai upaya penyempurnaan Kota Batam, maka diperlukan pula lebih pemerintah yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi serta perlu upaya mempromosikan lingkungan kerja normal dengan Pemasukan Daerah dan Pemasukan Pusat terkait pembangunan infrastruktur di Kota Batam. Dengan demikian infrastruktur dapat berperan dalam menggerakkan dan mendukung pembangunan partisipatifnya dimana sektor-bidang-bidang untuk menjadikan keberlanjutan sosial dan lingkungan lingkungan bagi masyarakat, sehingga dapat tercipta visi "Batam Kota Modern Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi Dan Perumahan".

3.5.3.2. Pemasukan Infrastruktur Jalan

- a. Tersebutnya anggaran, dengan di kapabilitas bagi jalan nasional dan jalan provinsi ini sangat membantu kegiatan Pemertaan Kota Batam dalam mengoptimalkan tingkat pemertaan jalan, untuk itu dengan perlu Optimalisasi skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemertaan dan Jalan Utuh (KSPU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Investasi Pemertaan (JIP) Jalan Daerah (JID) di Kementerian Pekerjaan Umum, serta integrasi program pusat dan provinsi. Privatisasi pembangunan jalan di kawasan dengan nilai ekonomi tinggi dan akses publik utama.

- b. Rataan Jalan Tinggi diatas Kemiringan Bumi, Pemasangan ulang rata tegak dan pengisian struktur jalan pada bantalan landasi dan pabrukan. Terapkan pengisian berokla terhadap bentuk tonase landasan serta pengaturan jari hamparan landasan serta dipengkasnya penampang jalan tinggi baik itu tinggi atas, tinggi tengah maupun tinggi dalam.
- c. Kualitas Pemasangan Tahan Kemiringan Aliran dan Kemiringan Tahan dan BUM Persegi Jaga, Kemiringan Persegi dan Pengisian kerang maupun Pengisian semen pengisian propak, untuk beton mendasar, serta penguatan semen crumpling dalam setiap tahapan proyek infrastruktur jalan.
- d. Kualitas Topografi yang Lengkap, Pemasangan kembali data geometrik dan topografi digital yang terintegrasi, serta desain infrastruktur sipil seperti perbatasan long dan sistem drainase pemukiman.

3.4.3.2. Pemasalahan Banjir

- a. Perbaikan Tata Ruang Lahan yang rusak, dipertahankan RTH, kembali pengalihan lahan dan RTH RTW dan RTH Kota Kota secara bertahap dan pengalihan alih fungsi lahan melalui sistem zonasi berbasis dampak lingkungan dan Rencana Drainase Impact Assessment.
- b. Tidak Diperkenanya Pemasalahan Lahan dengan Bentuk Drainase, Pemasangan ulang jaringan drainase dan terintegrasi ke dalam pola pemerintahan kota. Setiap pembangunan harus dipikirkan penyusutan rencana sistem drainase mikro dan makro.
- c. Tanggapan Cerdas Wajar, Pemasalahan lahan sistem, tidak, namun respon di kawasan pemukiman dan drainase terdapat di area publik. Cerdas dan pelektra serta untuk pengalihan risiko dan pengalihan dan.
- d. Ropertor Drainase Tidak Hilang, Menerapkan Datar Pagar, Rencanakan volume aliran, pabrukan aliran melalui dan penampang aliran, baru berbasis kajian hidrologi. Terapkan sistem drainase terpadu (separate system) di kawasan padat.
- e. Penguatan Elevasi (Grounding Plan) Tidak Dikawat, Standarisasi Rataan Elevasi kawasan baru dan renovasi ulang grading plan di kawasan aliran. Terapkan sistem 'area runoff' di kawasan pengalihan baru.

- g. Kemandirian Masyarakat yang Rendah terhadap Bencana. Edukasi masyarakat melalui kampanye kesehatan bencana, pelatihan RT/RW dan komunitas lingkungan. Bekerja administratif terhadap pemerintahan kampung ke sistem air yaitu disuguhkan.
- h. Penegakan Hukum lemah terhadap Pelanggaran Tata Ruang. Penguatan regulasi peraturan hukum lingkungan, pembatasan ukuran luas pembangunan tata ruang, serta inspeksi/pemantauan melalui sistem satelit.
- i. Pengaruh Peningkatan Air Laut (Eutrofikasi). Pemasangan pipa air tidak gas di kawasan utama, pembangunan sistem pompa air otomatis, dan normalisasi saluran-saluran utama yang terdistribusi langsung ke laut.

3.5.4. Simpulan

Kepentingan dalam mengatasi hambatan/hambatan tersebut akan berdampak besar terhadap keberhasilan pencapaian Kota Batam. Tanpa penyelesaian yang tepat, hambatan/hambatan ini akan terus mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi Kota Batam. Berikutnya adalah signifikan yang mungkin terjadi:

- a. Kerugian Ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan pertumbuhannya melambat.
- b. Penurunan Kesejahteraan Warga, terutama di wilayah permukiman lingkungan terjelek.
- c. Minimnya Daya Ruang Kota, baik dari sisi ekonomi maupun pariwisata.
- d. Penegakan Hukum APBD, akibat biaya perbaikan infrastruktur yang terus bertumbuh. Runtuhnya infrastruktur vital yang mengganggu mobilitas dan logistik.
- e. Dampak yang mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- f. Kerugian aset publik dan rumah tangga akibat gempa bumi besar.
- g. Penurunan indeks lingkungan, kualitas air, dan daya tangkapan.

Hambatan dalam pencapaian jalan menuju era perikanan titik berat bukan sekedar permasalahan teknis, tetapi juga mempengaruhi aspek tata kelola, pemerintahan ruang, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dan harusnya Daya Ruang Kota Batam, dengan dukungan semua pemangku kepentingan, perlu terus mendorong terciptanya dan integrasi ketahanan dalam mewujudkan Kota Batam yang lebih tangguh, nyaman, dan berkelanjutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBERLANJUTAN

3.1. Keberhasilan Tujuan Sasaran Dalam Rinc Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dengan Rinc, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026

Penggunaan Rencana Strategis (Rencana) Dalam Rinc Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Rencana, Standar, Peraturan, dan Kebijakan (RSTP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021. Instruksi tersebut menegaskan pentingnya pencapaian pemerintahan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan penguatan fungsi pelayanan publik di daerah.

Tabel 3.1. Rinc, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026

No	Rinc RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	Meningkatnya kualitas keberlanjutan, aksesibilitas, dan pemerataan infrastruktur dasar yang modern

Batam dengan arah pembangunan yang mengarah secara selaras dengan rencana dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, Tujuan yang menjadi acuan oleh Rinc Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah "Meningkatkan Infrastruktur Pakarjana Umum yang Aman, Nyaman, dan Terpadu." Tujuan ini sejalan dengan Rinc RPJMD Kota Batam, yaitu "Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," yang menekankan pentingnya distribusi pembangunan infrastruktur secara adil di seluruh wilayah. Selain dengan hal tersebut, tujuan ini juga mendukung Tujuan RPJMD Kota Batam yaitu "Meningkatnya pelayanan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien," yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur yang terjangkau, berkualitas tinggi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, tujuan yang diarahkan Rinc Marga dan Sumber Daya Air juga mendukung pencapaian Rencana RPJMD Kota Batam berupa "Meningkatnya kualitas keberlanjutan, aksesibilitas, dan pemerataan infrastruktur dasar yang modern," sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya menyediakan keberlanjutan jalan dan pelayanan sumber daya air, tetapi juga memberikan jaminan rasa aman, kenyamanan, serta keberlanjutan

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

Ini sejalan dengan Rencana RPJMD Kota Batam, yaitu "Memadangkannya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai," tujuan Dinas EMDA secara langsung berkaitan pada prioritas ini.

Aman dan Nyaman: Dinas EMDA memastikan jalan, jembatan, dan saluran air dibangun dengan standar keamanan tinggi. Ini memberikan rasa aman bagi pengguna jalan dan masyarakat. Kenyamanan juga ditingkatkan melalui pemeliharaan rutin, seperti perbaikan jalan berlubang dan pembaruan drainase.

Terpadu: Kota terpadu dalam tujuan Dinas EMDA mengarah pada integrasi berbagai sistem infrastruktur. Peningkatan jalan tidak hanya menghubungkan titik A ke B, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan transportasi, pemukiman, dan fasilitas layanan publik.

Dengan menjabarkan tujuannya, Dinas EMDA secara langsung berkontribusi pada pencapaian indikator konektivitas (menghubungkan wilayah), aksesibilitas (mempermudah pergerakan orang dan barang), serta pemenuhan infrastruktur dasar jalan, drainase air, pengendali banjir yang modern, tujuan Dinas EMDA tidak hanya berfokus pada aspek fisik untuk mencapai visi besar Kota Batam, menjadikannya kota yang modern, maju, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua rencana strategi utama yang sejalan dengan arahan RPJMD, yaitu:

A. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman

Rencana ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas, konektivitas, dan pemeliharaan infrastruktur jalan agar mampu mendukung mobilitas masyarakat, mempermudah arus barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Indikator utama yang digunakan mencakup:

- Pemenuhan jalan baru dalam kondisi memadai
- Rasio konektivitas antar-wilayah strategis
- Tingkat keamanan masyarakat terhadap pelayanan jalan

B. Meningkatkan Perindungan Masyarakat Terhadap Risiko Banjir

Rencana ini difokuskan pada pengurusan sistem pengendalian banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, kolam retensi, dan infrastruktur pengendali banjir lainnya, serta integrasi pemantauan tata ruang dan sistem drainase. Indikator pencapaiannya antara lain:

- Pemenuhan jumlah titik pengendali air / banjir

- Pemenuhan layanan dasar dasar yang terintegrasi
- Dan wilayah yang memperoleh pelayanan dari infrastruktur pengendali banjir

Reformasi ini juga akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi Kota Batam sebagai kota maju, modern, dan tangguh terhadap perubahan dalam serta tantangan urbanisasi yang dinamis.

3.2. Tujuan Rencana Rencan Kota Bangun Dan Sumber Daya Air Kota Batam 2024-2039

Visi pembangunan daerah dalam RP/MD Kota Batam Tahun 2023-2029 merupakan pernyataan dan visi jangka daerah dan visi jangka daerah terpadu. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selanjut 5 (lima) tahun.

Salah satu misi visi daerah Kota Batam telah disampaikan dan sejalan dengan visi Asia Cita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Asia Cita berarti merupakan 5 misi yang diuraikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mewujudkan visi yaitu, "BERKUALITAS INDONESIA MAJU MELIPUTI INDONESIA 2045".

Gagasan pembangunan berdasarkan capaian pelaksanaan pembangunan pada sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2023-2029 adalah: "BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERADA DI PUSAT INOVATASI DAN PANTARABATA".

Salah satunya visi ini terkandung sangat rencana pokok visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Rancangan rencana pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang bentuk ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RP/MD Kota Batam Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tabel Uraian Pokok Visi

NO.	POKOK VISI	URAIAN
1	Utama dan Berbudaya	Utama dan berbudaya menggambarkan bentuk masyarakat Kota Batam yang beradab dan berbudaya. Kota ini akan terus budaya masyarakat kota utama dalam upaya pembangunan masyarakat. Hal ini berarti menjadi dasar pembangunan budaya masyarakat kota pada lingkungan yang meliputi pemerintahan, bisnis, pola perilaku, lingkungan, layanan.

strategi internal maka baik perusahaan akan mencapai tujuan yang terapan internal dan eksternal dan dengan strategi manajemen. Dan karena itu, implementasi strategi akan dan pelaksana akan bagi perusahaan yang akan. Untuk itu strategi perusahaan, strategi manajemen yang, mengintegrasikan internal dan proses perusahaan internal akan, bekerja dan bekerja dengan strategi internal yang yang terapan akan mengintegrasikan proses perusahaan dalam di dalam dan di luar negeri akan terapan strategi mengintegrasikan proses dan organisasi baru. Perusahaan yang yang akan terapan, tidak akan terapan akan terapan, program implementasi akan terapan.

Visi Kita Dalam periode 2025-2035 mereduksikan pada pertumbuhan baru modal yang inovatif, berkelanjutan dan berdaya, dan pertumbuhan ekonomi Kita Dalam pada dengan memaksimalkan potensi Dalam sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan terapan di atas dengan sebagai mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan Kita Dalam yang dapat memberikan masyarakat secara umum.

Ini adalah langkah strategi yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan dan pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu mengoptimalkan secara jelas dan yang akan dapat dan mengoptimalkan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dapat dan memantapkan jalan yang akan dapat untuk mencapai visi.

Ini dilaksanakan ke dalam bentuk-bentuk penjelasan yang terapan dipadukan dan memantapkan penerapannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terapan. Misi harus dapat memantapkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Perusahaan Kita dalam rangka mengoptimalkan dan mengoptimalkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas mengoptimalkan dan yang akan dapat dan mengoptimalkan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dilaksanakan dengan memantapkan faktor-faktor lingkungan, strategi, baik eksternal maupun internal. Kebijakan yang terapan dalam visi dan misi adalah dalam rangka mengoptimalkan keajaiban, masyarakat, memajukan daerah, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, memantapkan pelayanan daerah, mengoptimalkan pelayanan pelayanan pembangunan baru dan provinsi dengan nasional serta memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Perjalanan misi harus dapat mengoptimalkan misi dan misi visi Kita dan Wakil Kita Kita terapan dengan memantapkan secara jelas dan arah kebijakan RENCANA periode berikutnya. Dengan memperkembangkan misi visi yang terkandung di dalam Visi Kita Dalam Tahun 2025-2035, maka berikut ini

tersebut. Hasilnya akan diolah berdasarkan teori-teori yang ada mengenai Latah. Selain itu, akan diuraikan juga mengenai Latah sebagai salah satu bentuk gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial.

Sumber 2.3 Sumber data penelitian antara lain penerbitan Kota
Batam tahun 2015-2018 dan Kota Cita.

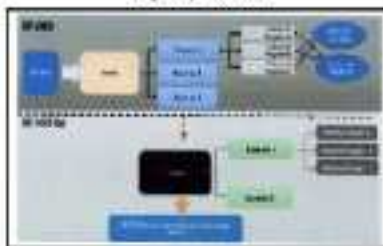


Berikut pengelompokan urusan Pekerjaan Umum: Dinas SDA, Marga Dan
Kanalir Daya Air Kota Sumed: meniadang dari ke-1 yaitu Menjadikan
Pemerintah Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan dari ke-2
Menjadi Badan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Gambar 3.5 Sumber Halusinasi Sensor 70 dengan Dokumen Perencanaan Jalan



Sumber 3.4 Gambar Diagram Kerangka Katerbitan Sistem RPJMD
Dengan Tolak Ratu



Dinas Tata Maya dan Sumber Daya Abi Kota Batam merupakan organisasi Pemerintah daerah yang menjalankan pemerintahan di daerah dan berperan sebagai level operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah, mengura pada urusan pemerintahan Kota Batam Tahun 2021-2023 karena urusan merupakan penerjemah dari tujuan akan dengan Kota Batam dan masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terdapat dalam suatu indikator berupa turunan. Sementara dalam menjalankan penerjemah dari misi pemerintahan.

Kawijakan umum: Uraian, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2020-2029 dan/atau Tahun Perencanaan Daerah

Tabel 3.2. Tabel Teknik Memasukkan Tugan dan Sejenis Ranset Dina
Rina Haraga dan Basilio Dora Ali

Kategori Jenis Kendaraan	Tipe / Model	Indikator Tipe / Model	Status	Jumlah di Batas	Tahun Tahun						Total Jumlah
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil									
	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil									
Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil									
Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil									
Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil	Kendaraan Kecil Kategori Kendaraan Kecil									

3.5 Rencana Rasteri Dinas Kota Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategi pembangunan infrastruktur Kota Batam yang terkait aspek, layanan, keterjangkauan, dan tanggung terhadap layanan, serta mendukung visi pembangunan jangka menengah Kota Batam Tahun 2025-2029, Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air menerapkan sejumlah rencana strategi yang terarah, terukur, dan selaras dengan strategi pembangunan daerah, Nasional, Daerah, Provinsi dan Nasional (2025), serta beberapa masyarakat.

Rencana strategi yang ditetapkan dalam Rencana Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan, serta sebagai dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas Masyarakat melalui Infrastruktur Jalan yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan

Batam ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan kota, guna meningkatkan efisiensi masyarakat dan aktivitas barang/jasa antar kawasan. Hal ini pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memadai, menerapkan masyarakat meningkatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Meningkatkan Peningkatan Masyarakat terhadap Riseri Otonomi dan Energi

Peningkatan kemampuan rural kaja, urbanisasi yang pesat, dan berkembang kapasitas dimana telah menyebabkan tekanan makin besar dan tekanan di berbagai wilayah Kota Batam. Oleh karena itu, sasaran ini menekankan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali besar, rekayasa sistem drainase, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Meningkatkan Tercapai Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air yang Efisien, Responsif, dan Inovatif Dalam mendukung prinsip pemerintahan yang baik, diperlukan peningkatan efisiensi pelayanan melalui sistem manajemen infrastruktur yang berbasis data, partisipatif, dan transparan. Batam ini bertujuan meningkatkan keterbukaan akses dalam pemerintahan melalui informasi dalam pengelolaan infrastruktur, serta memperkuat rasnya pelayanan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Batam ini akan terarah untuk mendukung upaya kinerja yang lebih baik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran

KAJIAD Kota Batam Tahun 2023-2028, dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan umum dan sumber daya air.

2.4. Strategi Peningkatan Daerah dalam Menapai Tujuan dan Sasaran Rencana PD Tahun 2023-2028

Dalam menghadapi kompleksitas pembangunan infrastruktur dan sumber lingkungan perairan, Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam menetapkan strategi yang menyeluruh, adaptif, dan berbasis data dalam rangka mencapai dua tujuan utama Rencana 2023-2028, yaitu:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat melalui Infrastruktur Jalan yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap Risiko Banjir

Tabel 2.4 Tabel Perumusan Strategi dan Aksi Kebijakan Rencana Dinas Kota Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Aksi Kebijakan
1	Memajukan infrastruktur transportasi umum yang aman, nyaman dan terpadu	1.1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	1.1.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	1.1.2.1. Melakukan Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Jalan
				1.1.2.2. Melakukan Pengisian Perbaikan Rutin Infrastruktur Jalan
		1.2. Meningkatkan keselamatan masyarakat yang terpadu	1.1.3. Meningkatkan keselamatan masyarakat yang terpadu	1.1.3.1. Melakukan Pengisian Perbaikan Rutin Infrastruktur Jalan
				1.1.3.2. Melakukan Pengisian Perbaikan Rutin Infrastruktur Jalan

Dalam tujuan tersebut dijabarkan pada uraian SPKMD Kota Batam 2023-2028, Mekan. Penger. Penger. dan Ketersin (SPKMD) sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024, serta proses pengembangannya berdasarkan sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Kawasan Industri).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan infrastruktur yang unggul, berkualitas, serta harmonisasi lingkungan, dan tabel 3.4. Rincian Rona Warna dan Tampilan Daya Air Kota Batam menetapkan arah kebijakan utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2029, yaitu:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan perbatasan yang berperan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan utama yang diambil antara lain:

- Peningkatan cakupan pembangunan dan rehabilitasi jalan baru dalam kredit money.
- Penguatan program pemeliharaan jalan berbasis data kondisi aktual di lapangan.
- Penguatan winning ranch lingkungan dan konstruksi jalan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- Optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Daerah, dan sumber-sumber (PTT) untuk pengembangan infrastruktur jalan.
- Integrasi sistem informasi manajemen jalan untuk pemantauan dan evaluasi infrastruktur jalan secara real time.
- Peningkatan kualitas sarana pendukung jalan (sumbu, marka, rambu, drainase jalan).

Indikator Kinerja Utama (IKU):

- Persentase jalan baru dalam kredit money (%)
- Panjang jalan yang dibangun/direhabilitasi (km)
- Jumlah rambu dan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang

Desain strategi:

- Tersedianya jalan perbatasan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat

2. Meningkatkan Peningkatan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir dan penguatan sistem pertahanan, dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan, tata ruang, dan peningkatan kapasitas infrastruktur drainase.

Kebijakan utama yang akan diwujudkan meliputi:

- Pemertugunaan dan pemanfaatan lapangan selama aktivitas utama dan istirahat.
- Berjalanlah bolam seperti dan sangat terapan di wilayah rumah besar
- Penguasaan keahlian dengan CFD untuk bisa dan sekitar orang lain menjadi kawasan terapan dan pengabdian air hujan.
- Penguasaan para keragaman besar beraneka GDI sebagai dasar pengabdian kehidupan penangkapan.
- Pemertugunaan sistem aktivitas terapan sesuai arahan Rancangan Indek Gerakan Kota Baru.
- Kemampuan keahlian khusus masyarakat terapan pengabdian air dan terapan terapan aktivitas.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Jumlah wilayah/kawasan yang memperoleh pelayanan dari infrastruktur pengabdian besar (M)
- Jumlah sistem aktivitas yang dikembangkan/dilakukan (K)
- Jumlah bolam sistem yang dilakukan/dilakukan

Keuntungan strategis

- Efektivitasnya bisa dan efektivitas keragaman terapan besar dan terapan di Kota Baru

Pendekatan Arak Kebijakan

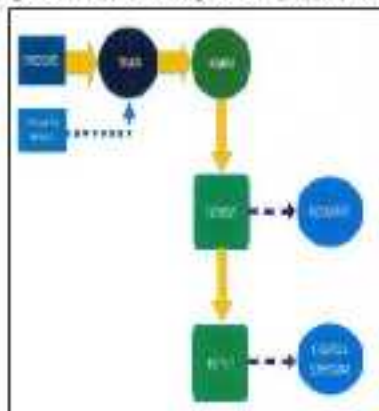
Untuk mendukung arak kebijakan tersebut, Dinas Kota Baru dan Pemerintah Kota Air menerapkan program utama sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Penguasaan
2. Kebijakan masyarakat, dinas arak, efisiensi, serta penguasaan lapangan ini dalam pemerintahan dan pelaksanaan program.
3. Kebijakan Rukun dan Ura
4. Menyusun kebijakan berdasarkan hasil survei terkait, data IKU, laporan kinerja (quarterly study), dan masyarakat terkait.
5. Keragaman Hasil (Result-Based Planning)
6. Untuk kebijakan berdasarkan pada pencapaian output, outcome, dan dampak yang terkait terapan kinerja terapan masyarakat.
7. Adaptasi terapan Lapangan dan Gerakan
8. Untuk dan menerapkan program adaptasi terapan perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial ekonomi Kota Baru.

BAK IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil turunan dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan unit administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemerintahan. Dalam program, kegiatan, dan subkegiatan akan mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sehingga perlu penyusunan alur dari tahun program tahun 2021 merupakan bagian dari upaya mencapai kesinambungan pemerintahan PD pada siklus pemerintahan Saja PD Tahun 2020.

Gambar 4.1. Diagram Diagram Alir Perencanaan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rencana Dinas Elin Warga Dan Dinas Desa Air Hutan Batan





The diagram illustrates the experimental setup. A participant is seated at a table, looking at a monitor. On the monitor, there is a 3D model of a building and a 2D floor plan. The participant is using a mouse and keyboard to interact with the 3D model. A head-mounted display (HMD) is worn by the participant to provide a first-person perspective. A data glove is also shown, which is used to interact with the 3D model. The entire setup is connected to a computer system.



Topic	Concepts	Formulas
1. Kinematics	- Position, Displacement, Distance - Velocity, Acceleration - Free Fall	$v = \frac{dx}{dt}$ $a = \frac{dv}{dt}$ $v^2 = u^2 + 2as$ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
2. Dynamics	- Newton's Laws of Motion - Force, Mass, Weight - Friction	$F = ma$ $W = mg$ $F_f = \mu R$
3. Energy	- Work, Energy, Power - Kinetic Energy, Potential Energy - Conservation of Energy	$W = F \cdot s$ $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ $E_p = mgh$
4. Momentum	- Momentum, Impulse - Conservation of Momentum	$p = mv$ $J = \Delta p$
5. Rotational Motion	- Angular Displacement, Angular Velocity - Angular Acceleration - Torque, Moment of Inertia	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$ $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ $\tau = I\alpha$
6. Simple Harmonic Motion	- Displacement, Velocity, Acceleration - Period, Frequency - Energy in SHM	$a = -\omega^2 x$ $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
7. Waves	- Transverse Waves, Longitudinal Waves - Wave Speed, Wavelength, Frequency - Superposition, Interference	$v = \lambda f$ $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$
8. Optics	- Reflection, Refraction - Lenses, Mirrors - Dispersion of Light	$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ $n = \frac{c}{v}$
9. Modern Physics	- Photoelectric Effect - Atomic Structure - Radioactivity	$E = hf$ $E = mc^2$

Date	Time	Location	Weather	Wind	Remarks
11/11/2019	08:00	St. Ignace	Clear	Light	Arrived at St. Ignace. Temperature 15°C. Windy.
11/11/2019	09:00	St. Ignace	Clear	Light	Left St. Ignace. Temperature 16°C. Windy.
11/11/2019	10:00	St. Ignace	Clear	Light	Arrived at St. Ignace. Temperature 17°C. Windy.
11/11/2019	11:00	St. Ignace	Clear	Light	Left St. Ignace. Temperature 18°C. Windy.
11/11/2019	12:00	St. Ignace	Clear	Light	Arrived at St. Ignace. Temperature 19°C. Windy.
11/11/2019	13:00	St. Ignace	Clear	Light	Left St. Ignace. Temperature 20°C. Windy.

[illegible]

Case No.	Case Name	Case Description
1	Case 1	Description of Case 1
2	Case 2	Description of Case 2
3	Case 3	Description of Case 3
4	Case 4	Description of Case 4
5	Case 5	Description of Case 5
6	Case 6	Description of Case 6
7	Case 7	Description of Case 7
8	Case 8	Description of Case 8
9	Case 9	Description of Case 9
10	Case 10	Description of Case 10
11	Case 11	Description of Case 11
12	Case 12	Description of Case 12
13	Case 13	Description of Case 13
14	Case 14	Description of Case 14
15	Case 15	Description of Case 15
16	Case 16	Description of Case 16
17	Case 17	Description of Case 17
18	Case 18	Description of Case 18
19	Case 19	Description of Case 19
20	Case 20	Description of Case 20
21	Case 21	Description of Case 21
22	Case 22	Description of Case 22
23	Case 23	Description of Case 23
24	Case 24	Description of Case 24
25	Case 25	Description of Case 25
26	Case 26	Description of Case 26
27	Case 27	Description of Case 27
28	Case 28	Description of Case 28
29	Case 29	Description of Case 29
30	Case 30	Description of Case 30
31	Case 31	Description of Case 31
32	Case 32	Description of Case 32
33	Case 33	Description of Case 33
34	Case 34	Description of Case 34
35	Case 35	Description of Case 35
36	Case 36	Description of Case 36
37	Case 37	Description of Case 37
38	Case 38	Description of Case 38
39	Case 39	Description of Case 39
40	Case 40	Description of Case 40
41	Case 41	Description of Case 41
42	Case 42	Description of Case 42
43	Case 43	Description of Case 43
44	Case 44	Description of Case 44
45	Case 45	Description of Case 45
46	Case 46	Description of Case 46
47	Case 47	Description of Case 47
48	Case 48	Description of Case 48
49	Case 49	Description of Case 49
50	Case 50	Description of Case 50
51	Case 51	Description of Case 51
52	Case 52	Description of Case 52
53	Case 53	Description of Case 53
54	Case 54	Description of Case 54
55	Case 55	Description of Case 55
56	Case 56	Description of Case 56
57	Case 57	Description of Case 57
58	Case 58	Description of Case 58
59	Case 59	Description of Case 59
60	Case 60	Description of Case 60
61	Case 61	Description of Case 61
62	Case 62	Description of Case 62
63	Case 63	Description of Case 63
64	Case 64	Description of Case 64
65	Case 65	Description of Case 65
66	Case 66	Description of Case 66
67	Case 67	Description of Case 67
68	Case 68	Description of Case 68
69	Case 69	Description of Case 69
70	Case 70	Description of Case 70
71	Case 71	Description of Case 71
72	Case 72	Description of Case 72
73	Case 73	Description of Case 73
74	Case 74	Description of Case 74
75	Case 75	Description of Case 75
76	Case 76	Description of Case 76
77	Case 77	Description of Case 77
78	Case 78	Description of Case 78
79	Case 79	Description of Case 79
80	Case 80	Description of Case 80
81	Case 81	Description of Case 81
82	Case 82	Description of Case 82
83	Case 83	Description of Case 83
84	Case 84	Description of Case 84
85	Case 85	Description of Case 85
86	Case 86	Description of Case 86
87	Case 87	Description of Case 87
88	Case 88	Description of Case 88
89	Case 89	Description of Case 89
90	Case 90	Description of Case 90
91	Case 91	Description of Case 91
92	Case 92	Description of Case 92
93	Case 93	Description of Case 93
94	Case 94	Description of Case 94
95	Case 95	Description of Case 95
96	Case 96	Description of Case 96
97	Case 97	Description of Case 97
98	Case 98	Description of Case 98
99	Case 99	Description of Case 99
100	Case 100	Description of Case 100

[illegible]

Project Overview									
Project Name		Project Manager			Project Start Date		Project End Date		
Project A		John Doe			2023-01-01		2023-03-31		
Project B		Jane Smith			2023-02-01		2023-04-30		
Project C		Mike Johnson			2023-03-01		2023-05-31		
Project D		Sarah Brown			2023-04-01		2023-06-30		
Project E		David White			2023-05-01		2023-07-31		
Project F		Emily Green			2023-06-01		2023-08-31		
Project G		Chris Black			2023-07-01		2023-09-30		
Project H		Alex Grey			2023-08-01		2023-10-31		
Project I		Mia Blue			2023-09-01		2023-11-30		
Project J		Noah Red			2023-10-01		2023-12-31		

Geological Map of the Study Area									
Legend	Topography	Geology	Hydrology	Infrastructure	Settlements	Vegetation	Soils	Climate	Other
- Contour Lines - Spot Elevation - Water Bodies - Drainage Network - Roads - Railways - Buildings - Fields - Forests - Soil Types - Climate Zones	- Contour Lines - Spot Elevation - Water Bodies - Drainage Network	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Water Bodies - Drainage Network	- Roads - Railways	- Buildings - Fields	Forests	Soil Types	Climate Zones	Other
Geological Map of the Study Area									
- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian	- Quaternary - Tertiary - Cretaceous - Dinosaur - Permian - Carboniferous - Devonian - Silurian - Ordovician - Pre-Cambrian

Project Schedule Summary											
Project Overview			Task Details								
Task ID	Task Name	Priority	Start Date	End Date	Duration (Days)	Assigned To	Status	Progress (%)	Comments	Dependencies	Notes
1	Project Initiation	High	2023-01-01	2023-01-05	5	John Doe	Completed	100	Initial meeting held		
2	Requirement Gathering	Medium	2023-01-06	2023-01-15	10	Jane Smith	In Progress	75	Collecting user requirements	1	
3	System Design	High	2023-01-16	2023-01-25	10	Mike Johnson	Not Started	0	Waiting for requirements	2	
4	Database Design	Medium	2023-01-16	2023-01-20	5	Emily White	In Progress	50	Designing database schema	2	
5	UI/UX Design	Medium	2023-01-16	2023-01-25	10	David Brown	Not Started	0	Waiting for requirements	2	
6	Backend Development	High	2023-01-26	2023-02-10	15	John Doe	Not Started	0	Waiting for design	3, 4, 5	
7	Frontend Development	High	2023-01-26	2023-02-10	15	Jane Smith	Not Started	0	Waiting for design	3, 4, 5	
8	Integration Testing	Medium	2023-02-11	2023-02-20	10	Mike Johnson	Not Started	0	Waiting for development	6, 7	
9	User Acceptance Testing	High	2023-02-21	2023-03-05	15	Emily White	Not Started	0	Waiting for testing	8	
10	Deployment	High	2023-03-06	2023-03-10	5	David Brown	Not Started	0	Waiting for testing	9	



Figure 1 illustrates a schematic diagram of a multi-layered structure. The top layer is blue and labeled 'Air'. Below it is a yellow layer labeled 'Polymer'. The bottom layer is divided into two parts: a light blue section labeled 'Polymer' and a white section labeled 'Substrate'. The entire structure is shown within a grid. Arrows indicate the direction of light or signal flow from the top layer through the polymer layers to the substrate.

Project Management - Resource Allocation									
Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration (Days)	Resource Type	Resource Name	Allocation (%)	Notes	Status
1	Project Initiation	2023-01-01	2023-01-05	5	Project Manager	John Doe	100	Initial meeting with stakeholders	Completed
2	Requirement Gathering	2023-01-06	2023-01-15	10	Business Analyst	Jane Smith	100	Interviews with end-users	In Progress
3	System Design	2023-01-16	2023-01-25	10	Software Engineer	Mike Johnson	100	UML diagrams and database schema	Planned
4	Development	2023-01-26	2023-02-10	15	Software Engineer	Alice Brown	100	Backend API development	Planned
5	Testing	2023-02-11	2023-02-20	10	QA Engineer	Bob White	100	Unit and integration tests	Planned
6	Deployment	2023-02-21	2023-02-25	5	DevOps Engineer	Charlie Black	100	Production environment setup	Planned
7	Post-Deployment	2023-02-26	2023-03-05	10	Project Manager	John Doe	100	Monitoring and user feedback	Planned
8	Project Closure	2023-03-06	2023-03-10	5	Project Manager	John Doe	100	Final report and stakeholder meeting	Planned

Geological Map of the [Area Name]									
Scale	1:50,000	Legend		Topographic Data		Geological Data		Notes	
		Symbol		Elevation (m)		Rock Type		Remarks	
1	2	3		4		5		6	
		7		8		9		10	
11	12	13		14		15		16	
		17		18		19		20	
21	22	23		24		25		26	
		27		28		29		30	
31	32	33		34		35		36	
		37		38		39		40	
41	42	43		44		45		46	
		47		48		49		50	
51	52	53		54		55		56	
		57		58		59		60	
61	62	63		64		65		66	
		67		68		69		70	
71	72	73		74		75		76	
		77		78		79		80	
81	82	83		84		85		86	
		87		88		89		90	
91	92	93		94		95		96	
		97		98		99		100	

Date		Time									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

4.3. Urutan Program Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan normatif Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Liris dan Nyaman serta Meningkatkan Fasilitasnya Masyarakat terdapat Tiga, Empat Dan Lima Dan Sumber Daya Air Kota Batam sudah merencanakan program secara komprehensif dan integrasi sinergis untuk mencapai sasaran pembangunan pemerintahan yang berorientasi dengan ketersediaan dan kesehatan terdapat Tiga, Melalui indikator kinerja yang terukur dan terukur. Dalam Tiga Lima Dan Sumber Daya Air Kota Batam berkoordinasi untuk mengoptimalkan ini "Ketersediaan Aksesibilitas Yang Berorientasi, Berdaya dan Berkelanjutan Sebagai Papan Lantai Dan Fasilitas."

Tabel 4.3. Tabel Program, Indikator Program dan Definisi Operasional

No	Program	Indikator Program	Definisi Operasional
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN	Peningkatan Panjang Jalan yang Dilengkapi	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMERINTAHAN	Ketersediaan Fasilitas Lahan dan Fasilitas	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Fasilitas Lahan dan Fasilitas 2. Fasilitas Lahan dan Fasilitas 3. Fasilitas Lahan dan Fasilitas
3	PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN LINTAS DAN KAWASAN JALAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
4	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
5	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
6	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
7	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
8	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
9	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
10	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
11	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran
12	PROGRAM PENGEMBANGAN LINTAS DAN KAWASAN LINTAS	Peningkatan Fasilitas Jalan Lintas (PUL) dan Fasilitas Jalan	Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tiga Tahun yang meliputi: 1. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 2. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran

4.2.1. **Isuarea 1: Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman, Indikator Sasaran: Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Uyaya peningkatan aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan infrastruktur daerah. Dengan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan jalan yang adil, terlayani layanan yang berkualitas, dan pemerataan layanan lalu lintas yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap jaringan transportasi yang aman dan nyaman merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aksesibilitas yang baik tidak hanya mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengakhiri pembangunan infrastruktur mendukung transportasi publik melalui tiga program adapun program-program yang mendukung program ini adalah:

4.2.1.1. **Program Penyelenggaraan Jalan, Indikator Kinerja: Peningkatan Paving Jalan yang Ditangani**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, program ini menyediakan tulang punggung pembangunan infrastruktur transportasi darat di daerah. Fokus utama program ini adalah pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten/kota agar mencapai kondisi mantap secara berkelanjutan. Jalan dalam kondisi mantap akan meningkatkan konektivitas antar kawasan, memperlancar arus lalu lintas, dan meningkatkan efisiensi biaya transportasi.

Uyaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas konstruksi jalan, pemeliharaan jalan untuk mendukung layanan lalu lintas, serta pemeliharaan rutin dan berkala guna mempertahankan umu infrastruktur. Dengan realisasi persentase paving jalan yang ditangani setiap tahun, program ini diharapkan mampu meningkatkan indeks konektivitas jalan secara signifikan di wilayah kabupaten maupun program.

4.2.1.2. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Indikator Kinerja: Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi yang Dilakukan Up Muka**

Ketersediaan jalan yang mantap dan berkualitas sangat berpengaruh pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Program ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan mutu proyek konstruksi di daerah melalui pelaksanaan uji mutu terhadap pelayanan konstruksi menjadi salah satu cara dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan

spesifikasi teknis dan kualitas yang ditetapkan, program ini akan dinilai pada pencapaian dan pengomposan terhadap jadwal yang ditetapkan agar setiap pekerjaan infrastruktur memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Uji mutu terhadap pekerjaan konstruksi menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas hasil pembangunan, mulai dari bahan bangunan, teknik pelaksanaan, hingga hasil akhir pekerjaan. Program ini juga mendukung partisipasi sistem keamanan jalan internasional dan pengalaman kemampuan penyedia jasa melalui pelayanan, penilaian, dan pelaksanaan serta pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, aman, dan berkeadilan.

4.2.1.3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Indikator Kinerja: Penuhannya Penanganan Jalan Umum (PJU) dalam Kondisi Baik

Dalam kualitas jalan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas lalu lintas yang memadai, salah satunya adalah Penanganan Jalan Umum (PJU). Program ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya di malam hari, melalui perbaikan dan pemeliharaan Penanganan Jalan Umum (PJU) infrastruktur RJU yang berfungsi dengan baik akan mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan rasa aman di ruang publik, program ini difokuskan pada pengoptimalan, pemertayaan, rekayasa, dan pemeliharaan PJU untuk memastikan bahwa jalan/jalan umum dan koridor permukiman tetap terang dan aman, terutama di malam hari.

PJU yang dalam kondisi baik akan memudahkan visual kendaraan, mendukung sistem keamanan malam hari, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Program ini mendukung integrasi sistem transportasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jalan di berbagai waktu dan lokasi.

4.2.2. Sasaran 2 Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir, Indikator Sasaran: Penuhannya Meningkatkan Perlindungan Kawasan Risiko Banjir

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aksi nyata akan telah menjadi meningkatnya potensi bahaya di wilayah perkotaan. Dalam rangka mengurangi risiko dan dampak banjir terhadap masyarakat, diperlukan program terpadu yang mengoordinasi pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sistem drainase yang memadai.

Pembangun jalan, urbanisasi yang pesat, dan aksi nyata telah meningkatkan meningkatnya bencana dan ancaman banjir di kawasan

perencanaan. Biaya tidak hanya membebani anggaran daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan masyarakat dari biaya menjadi salah satu fokus dalam pembangunan infrastruktur kehalangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas DDA Marga dan Sumber Daya Air Kota Sumedra mengimplementasikan dan program prioritas yang secara terpadu menangani bencana ini, dilaksanakan melalui dua program utama:

4.2.2.1. Program Pengalihan Sumber Daya Air (SDA), Indikator Kinerja: Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Ditingkatkan

Program ini mengabdikan upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengalihan biaya seperti pompa biaya, kanal, saluran, pipa, dan juga agar dapat menampung dan mengalirkan air secara efektif. Peningkatan infrastruktur SDA secara signifikan dan berkelanjutan merupakan kunci untuk melindungi masyarakat dari risiko banjir dan banjir. Kegiatan ini juga mempromosikan sistem pemantauan risiko dan lingkungan guna memastikan bahwa setiap intervensi tidak dilakukan secara tepat sasaran dan beres secara lingkungan.

Dengan indikator kinerja berupa peningkatan infrastruktur SDA yang ditingkatkan, program ini memastikan bahwa setiap intervensi memiliki dampak nyata dalam memastikan nilai biaya, mengurangi kerugian sosial ekonomi, dan meningkatkan kapasitas adaptasi wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.

4.2.2.2. Program Pengalihan dan Pengembangan Sistem Drainase, Indikator Kinerja: Peningkatan Sistem Drainase yang Ditingkatkan

Sistem drainase yang efektif dan berkapasitas tinggi merupakan komponen penting dalam pengendalian banjir dan risiko banjir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem drainase perkotaan yang terdampak langsung ke badan air dan mampu mengalirkan limpasan air hujan secara cepat. Peningkatan sistem drainase melalui pembangunan baru, rehabilitasi sistem lama, peningkatan kapasitas, serta operasi dan pemeliharaan secara berkala dan rutin akan mengurangi banjir, terutama di kawasan padat penduduk, pusat layanan ekonomi dan jalan.

Indikator kinerja berupa peningkatan sistem drainase yang ditingkatkan mengimplementasikan berbagai intervensi pemantauan daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Upaya ini turut menjaga keberlanjutan sistem drainase ekonomi, lingkungan, transportasi, dan lingkungan hidup masyarakat, khususnya di kawasan zona banjir.

Keseluruhan program di atas secara komprehensif dan sinergis dirancang untuk mencapai tujuan infrastruktur perkotaan yang berkapasitas dengan

memeritikan dan memberikan pelayanan terbaik. Melalui indikator kinerja yang terukur dan terukur, Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas masyarakat secara berkelanjutan.

4.2.3. **Kawasan 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah, Indikator** **Duaran: Indeks Kepuasan Masyarakat & Dinas Eten Marga dan Sumber Daya** **Air**

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pada Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui upaya optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta pengalihan sumber daya air yang aman, nyaman, dan terpadu. Hal ini diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator utama, yang membandingkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM sejalan dengan visi keempat Walikota Batam Tahun 2018-2024, yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang good governance". Melalui misi ini, Pemerintah Kota Batam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta bertanggung jawab. Dengan demikian, Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air memiliki peran strategis untuk meningkatkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selaras dengan misi tersebut, tujuan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan implementasi reformasi birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya sang. Salah satu indikator di lingkungan Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air diwujudkan melalui pengalihan proses layanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pemerintahan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparatur yang profesional dan berintegritas. Peningkatan kualitas pelayanan ini diharapkan tidak hanya terbatas dalam capaian IKM, tetapi juga mampu memperkuat daya sang Kota Batam sebagai kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

IKM adalah cara petinggi yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. IKM Dinas Eten Marga dan Sumber Daya Air mengukur berbagai aspek mulai dari prosedur pelayanan yang transparan, kecepatan layanan, hingga keterlaksanaan dan kualitas sarana prasarana.

Penelitian IKM & UEM SDA menunjukkan keberhasilan penerapan reformasi birokrasi NKM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang mereka terima, yang berarti:

1. Layanan Cepat dan Efisien: Waktu tunggu yang singkat untuk pengurusan dan atau penerapannya.
2. Responsif dan Komunikatif: Petugas yang ramah, informatif, dan mudah dijangkau.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Prosedur yang jelas, biaya terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kualitas Infrastruktur yang Terjaga: Fasilitas jalan yang layak, pelayanan online yang efektif, dan pengalihan nomor daya air yang optimal.

Dengan menjadikan IKM sebagai indikator kepuasan umum. Dinas Eku Marga dan Sumber Daya Air tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada kualitas pelayanan. Hal sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Penelitian kualitas pelayanan di UEM SDA, yang dilakukan dengan bantuan IKM, memiliki tingkat dampak yang signifikan. Warga yang sebelumnya merasa lebih pasif terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan ini merupakan bukti reformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan sebuah transformasi nyata yang mengubah cara pemerintah melayani. Penelitian IKM di Dinas Eku Marga dan Sumber Daya Air adalah bukti konkret bahwa Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wakil Kota saat ini berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dan memastikan Batam menuju masa depan yang lebih baik dan berdaya saing.

4.5. Urutan Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut kegiatan dukungan dan dipaparkan merupakan instrumen operasional yang mendukung pencapaian sasaran strategi pembangunan infrastruktur daerah. Kegiatan kegiatan tersebut saling terintegrasi dalam

meningkatkan kualitas layanan publik melalui administrasi, manajemen pemerintahan, ekonomi, serta menciptakan ruang hidup yang aman, nyaman, dan berdaya tahan terhadap bencana. Dengan pemerintahan yang matang dan pemerintahan yang berkinerja, dampak positif kegiatan akan dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Tabel 4.4. Tabel Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Definisi Operasional

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Indikator Operasional
1	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat	Pengukuran yang Beragam	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang terlibat}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
2	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
3	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
4	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
5	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
6	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
7	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
8	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
9	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$
10	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	Mengukur seberapa jauh masyarakat terlibat dalam kegiatan
			persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, yaitu: $\frac{\text{jumlah masyarakat yang berpartisipasi}}{\text{jumlah masyarakat yang seharusnya}} \times 100\%$

10	11	12	13
10	Adaptasi Masyarakat Masyarakat Melayu	Menyusun RPP yang Mengandung Pembelajaran	Menyusun rencana dan pengajaran pembelajaran
11	Adaptasi Sosial Masyarakat Melayu	Menyusun Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun rencana pembelajaran menyusun RPP dengan Tema 10/11/12 yang mengandung uji pembelajaran menyusun rencana 10/11/12/13 dan 10/12
12	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun rencana pembelajaran dengan tema 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 dan 10/12
13	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun rencana pembelajaran dengan tema 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 dan 10/12
14	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun rencana pembelajaran dengan tema 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 dan 10/12
15	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun Rencana Pembelajaran Masyarakat Melayu/Masyarakat	Menyusun rencana pembelajaran dengan tema 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 menyusun rencana 10/11/12/13 dan 10/12

Berikut adalah uraian kegiatan berdasarkan program dan materi yang
dalam kegiatan diberikan dari segi tujuan, ruang lingkup, serta referensi
terhadap indikator materi:

4.3.1. Materi 1: Mengetahui Kemampuan Masyarakat yang Aman dan Nyaman. Indikator Materi: Parameter Jalan Dalam Kondisi Mantap

4.3.1.1. Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Ekspedisi/Nota

Kegiatan ini merupakan komponen utama dalam monitoring
terhadap jalan yang mantap serta nilai dan hubungan di wilayah
ekspedisi/Nota. Penyelenggaraan jalan dilakukan melalui pendekatan terpadu
melalui tim perencanaan, teknis, pelaksanaan, pelaksanaan, konstruksi, hingga
pemeliharaan jalan dan jembatan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan serta
wilayah monitoring terhadap kondisi jalan yang mantap serta nilai dan hubungan
di wilayah ekspedisi/Nota yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Melalui
kegiatan ini, indikator parameter jalan dalam kondisi mantap diketahui
secara signifikan, sehingga memperkuat kondisi mobilitas perkotaan dan antar
kota.

4.3.1.2. Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jalan Konstruksi Cekupan Daerah Ekspedisi/Nota

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan mengoperasikan
sistem informasi yang mendukung pelayanan dan pengelolaan jalan
konstruksi secara terpadu, akurat, dan terintegrasi di tingkat daerah.
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan strategi

pengelolaan jasa konstruksi, penyediaan pelayanan umum lainnya, serta operasionalisasi layanan informasi konstruksi.

Pengembangan kegiatan ini mendukung peningkatan kualitas pekerjaan konstruksi melalui keterbukaan data dan pengoptimalan pengumpulan mutu pekerjaan. Dengan demikian, indikator persentase pekerjaan jasa konstruksi yang dilakukan di masa dapat tercapai, dan hasil pembangunan infrastruktur menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna.

4.0.1.2. Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan Lintas Lintas dan Angkutan Jalan (RIAJ) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LAJ sebagai dasar perencanaan dan pengaturannya lintas lintas serta sistem angkutan jalan yang terintegrasi dan efisien di tingkat kabupaten/kota.

Rencana Induk ini menjadi panduan pembangunan infrastruktur dan fasilitas jalan lintas, termasuk penyediaan sarana, moda, terminal, dan pemertan jalan umum (PJU). Dengan terlaksananya kegiatan ini, akan pengembangan sistem transportasi menjadi lebih tertata, memudahkan konektivitas dan kenyamanan pengguna jalan, serta meningkatkan indikator persentase PJU dalam bundle baik di wilayah yang berkembang.

4.0.2. Sasaran 2: Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir, Indikator Sasaran: Persentase Meningkatkan Perlindungan Kawasan Risiko Banjir

4.0.2.1. Kegiatan: Pengalihan Sumber Daya Air (PDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan pada upaya pengendalian banjir, konservasi air, dan perlindungan kawasan risiko bencana hidroметеоролог di daerah aliran sungai dan pantai. Ruang lingkup kegiatan mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti kanal banjir, embung, pompa air, polder, serta pengaman pantai.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi risiko banjir melalui pengelolaan aliran air secara teknis dan ekologi. Dengan indikator persentase rehabilitasi KLD yang ditargetkan, kegiatan ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan perlindungan kawasan risiko banjir, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana, serta menjaga keberlanjutan ekosistem sungai dan estuari.

4.3.3.3. Kegiatan Pengelolaan dan Penguatan Sistem Informasi yang Terhubung Langsung dengan Tenggul dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup pembangunan dan penguatan sistem informasi yang menghubungkan informasi pelayanan dan pelayanan langsung ke seluruh warga desa. Kegiatan ini meliputi pembangunan jaringan informasi baru, rehabilitasi sistem yang rusak, perbaikan sistem pendukung, serta operasi dan pemeliharaan sistem informasi secara rutin.

Kegiatan ini penting untuk menyediakan layanan ke warga, menyerah pelayanan, dan mengintegrasikan fungsi di kemudian pada pendak. Dengan indikator pemetaan sistem informasi yang dibangun, kegiatan ini menjadi penyambung piring dalam menghubungkan data yang aman dan pelayanan dan fungsi, serta menyediakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni.

4.4 Urutan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.5. Tabel Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan, dan Definisi Operasional

No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Definisi Operasional
1	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
2	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
3	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
4	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
5	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
6	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
7	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
8	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
9	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan
10	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan	Kelembagaan Sistem Informasi Desa, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan, Sistem Informasi Desa yang dibangun dan dikembangkan

1	2	3	4
20	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan upaya tindakan dan tindakan yang diharapkan	Penghimpun Usaha Sayuran Lahan Basah dan Perikanan yang berperan Kegagalan upaya tindakan dan tindakan yang diharapkan adalah :
21	Perencanaan Perikanan Taman Air (Taman Air) Sukadana, Jawa	Jurnal Dokumen Perikanan Taman Air (Taman Air) Sukadana, Jawa	Penghimpun Usaha Sayuran PerikananTaman Air Jurnal LK, Sukadana, Jawa Jurnal Dokumen Perikanan Taman Air (Taman Air) Sukadana, Jawa adalah :
22	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
23	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan
24	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
25	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
26	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
27	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
28	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
29	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
30	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
31	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :
32	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Kegagalan dan upaya tindakan dan tindakan	Penghimpun Usaha Sayuran Perikanan dan Perikanan Jurnal yang berisikan :

No	A	B	C
1)	Pengajuan Nomor Pendaftaran Nomor Pemohon Paten	Jumlah Nomor Pendaftaran Nomor Pemohon Paten yang terdaftar	Pengajuan Jumlah Nomor Pendaftaran Nomor Pemohon Paten yang terdaftar Jumlah Nomor Pendaftaran Nomor Pemohon Paten yang terdaftar adalah :
2)	Dokumen Sistem Operasi Paten	Jumlah Sistem Operasi Paten yang terdaftar	Pengajuan jumlah Sistem Operasi Paten yang terdaftar Jumlah Sistem Operasi Paten yang terdaftar adalah :
3)	Pengajuan Nomor Paten/Paten	Jumlah Nomor Paten/Paten yang terdaftar	Pengajuan Jumlah Nomor Paten/Paten yang terdaftar Jumlah Nomor Paten/Paten yang terdaftar adalah :
4)	Pengajuan Dokumen Paten Sistem Operasi dan Sistem Operasi Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten, Sistem dan Sistem Operasi Paten Paten yang terdaftar	Pengajuan jumlah Dokumen Paten, Paten, Sistem dan Sistem Operasi Paten Paten yang terdaftar Jumlah Dokumen Paten, Paten, Sistem dan Sistem Operasi Paten Paten yang terdaftar adalah :
5)	Kategori dan Subkategori Paten Paten Paten	Jumlah Kategori Paten Paten yang terdaftar dan Subkategori	Pengajuan Jumlah Nomor Paten Paten yang terdaftar dan Subkategori Jumlah Nomor Paten Paten yang terdaftar dan Subkategori adalah :
6)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
7)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
8)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
9)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
10)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
11)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
12)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
13)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
14)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
15)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
16)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
17)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
18)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
19)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
20)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
21)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
22)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
23)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
24)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
25)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
26)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
27)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
28)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
29)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	
30)	Pengajuan Dokumen Paten Paten Paten	Jumlah Dokumen Paten Paten Paten Paten	

A	B	C	D
a)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina Jalan Kota Baru	Jurnal Laporan Kegiatan dan Penelitian, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal laporan kegiatan dan penelitian, nomor 10, 2014, dan lain-lain yang terkait
c)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina	Jurnal Laporan Kegiatan dan Penelitian, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal laporan kegiatan dan penelitian, nomor 10, 2014, dan lain-lain
b)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina Jalan Kota Baru	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan
d)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina Jalan Kota Baru	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan
e)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina Jalan Kota Baru	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan
f)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina Jalan Kota Baru	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan
g)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina Jalan Kota Baru	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan
h)	Nasirudin dan Nurul Izzah, Kantor Bina Jalan Kota Baru	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 10, 2014, dan lain-lain yang berkaitan

4.4.1. Program Prioritas Peningkatan Pemeliharaan Jalan Lingkar

Untuk melaksanakan Peningkatan Pemeliharaan Jalan Lingkar berkaitan dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan indikator Rencana Strategis Jalan Dalam Kondisi Baik, maka perlu program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air antara lain:

Gambar 4.2. Sumber Pemeliharaan Jalan



4.4.1.1. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa secara aman, nyaman, dan efisien. Untuk penyelenggaraan diadopsi pada pendekatan kinerja untuk wilayah melalui penyelenggaraan jalan yang berorientasi dan berorientasi kinerja.

Gambar 4.1. Gambar Pemukiman Jalan



- **Regulasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**, meliputi: regulasi regulasi teknis dan administratif dalam rangka pembangunan, pemeliharaan, dan pengalihan jalan di wilayah kabupaten/kota untuk mendukung efisiensi yang optimal.
 - 1. **Subkegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Pemanfaatan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**, Menyusun dokumen perencanaan teknis jangka pendek dan panjang sebagai dasar pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan.
 - 2. **Subkegiatan: Pembangunan Jalan**, Membangun ruas jalan baru yang strategis untuk membentuk konektivitas antar kawasan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
 - 3. **Subkegiatan: Pemeliharaan Jalan**, Melakukan pemeliharaan menyeluruh pada jalan yang mengalami kerusakan berat agar dapat kembali berfungsi secara standar.

- Subkegiatan: Pemeliharaan Rutin. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencegah kerusakan jalan lebih lanjut dan memperpanjang umur pakai jalan.
- Subkegiatan: Pembangunan Jembatan. Menyediakan infrastruktur penghubung pada lokasi-lokasi jalan yang dipisahkan oleh sungai atau topografi lain.
- Subkegiatan: Pahlawan Jalan. Menambah lebar, tanggul bahu, pemukiman dan menyediakan volume lalu lintas yang meningkat dengan menambah kapasitas jalan.
- Subkegiatan: Survey Kredit Jalan. Mengumpulkan data teknis kondisi jalan sebagai dasar pengendalian kapasitas pemeliharaan dan pembangunan.
- Subkegiatan: Pemeliharaan Jalan. Menyaji kredit jalan tetap sesuai dan layak jalan melalui pemantauan baik secara langsung.

Gambar 4.4. Sumber Pemeliharaan Jalan



4.4.1.2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini mendukung peningkatan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan proyek konstruksi jalan melalui penguatan sistem informasi, regulasi, dan layanan jasa konstruksi di daerah.

- Kegiatan: Penguatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota. Berfungsi untuk membangun sistem informasi yang akurat dan terintegrasi mendukung transparansi, efisiensi, dan pengendalian kebijakan sektor konstruksi.
- Subkegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Penguatan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Galian, program,

menyediakan perlengkapan untuk safety jalan dan kesehatan (safety supply).

- Subbagian: Penyelenggaraan Pemangkat Pemadangan Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Menghasilkan pemangkat lencana dan pemangkat kerja pemangkat untuk mendukung sistem layanan informasi jasa konstruksi.
- Subbagian: Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi, Menghasilkan sistem informasi jasa konstruksi agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa dan masyarakat luas secara efektif.

4.4.1.3. Program Penyelenggaraan Lala Lintas Dan Rangkaian Jalan [L3]

Program ini mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan lala lintas serta mengatur tata lala rangkaian jalan yang efektif melalui perencanaan lala dan penyelenggaraan penyelenggaraan jalan.

- Bagian: Penetapan Rencana Lala Jaringan Lala Kelengkapan/Kata. Mengembangkan dokumen perencanaan lala pemangkat sistem jaringan lala yang efektif dengan rencana jalan dan tata ruang.
- Subbagian: Pelaksanaan Penyelenggaraan Rencana Lala Jaringan Lala Kelengkapan/Kata. Menyusun rencana lala jaringan lala sebagai acuan lala dan rencana penyelenggaraan lala lintas dan rangkaian.

Gambar 4.8. Sumber Penanganan Pemangkat Jalan Umum



- **Registri: Penyediaan Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.** Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan melalui pengadaan fasilitas perlangkapan jalan yang memadai.
- **Subkegiatan: Penyediaan Perlangkapan Jalan (PJU)** Kabupaten/Kota, Menyediakan penempatan jalan umum (PJU) pada lokasi-lokasi strategis untuk menunjang keselamatan pengguna jalan di malam hari.
- **Subkegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan (PJU).** Melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas PJU agar berfungsi optimal dan mendukung keselamatan lalu lintas.

4.4.2. Program Pelayanan Optimalisasi Pemangsaan Bangir

Untuk Meningkatkan Optimalisasi Pemangsaan Bangir berorientasi dengan Sasaran, Meningkatkan Perilaku dan Sikap Masyarakat Terhadap Bangir dengan Indikator Sasaran: Peningkatan Meningkatnya Perilaku dan Sikap Masyarakat Bangir akan harapan program yang dilaksanakan oleh Dinas Eka Karya dan Sumber Daya Air antara lain:

4.4.2.1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, efisien, dan konservasi pada tingkat nilai tinggi di wilayah kabupaten/kota. Pengelolaan difokuskan pada infrastruktur pengendalian banjir, konservasi air, dan pengendalian kualitas pasokan serta sungai.

- **Registri: Pengelolaan SDA dan Efisiensi Pemangsaan Pasir pada Wilayah Sungai (WS) dalam 3 (tiga) Daerah Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini merupakan upaya terintegrasi dalam membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur pengendalian banjir dan pengendalian kualitas pasokan agar masyarakat lebih terlindungi dari risiko bencana hidrometeorologi.
- **SubKegiatan: Pembangunan Sistem Pompa Bangir, Perbaikan Saluran penyaluran air untuk mempercepat pengaliran air pasokan pada kawasan zona banjir.**
- **SubKegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Kanal Bangir, Manaja fungsi kanal sebagai saluran utama pengaliran banjir agar berfungsi optimal melalui regime pemeliharaan rutin.**
- **SubKegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pompa Bangir, Mengoptimalkan operasional pompa banjir dengan pemeliharaan berkala dan pengendalian sistem kerja.**
- **SubKegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Saluran dan Pemangsaan Air Lainnya, Menjaga kapasitas saluran saluran**

dan dalam agar dapat menampung limbah air saat musim hujan.

Gambar 4.8. Gambar Paksiyasa Normalisasi



1. SubKegiatan: Normalisasi/Normalisasi Sungai. Menghentikan impasitas aliran sungai melalui pengaliran, penakuran, atau perbaikan bendasi alami sungai.
2. SubKegiatan: Pembangunan Bendasi Bangir. Menambuh jalur aliran sungai air hujan yang langsung ditiriskan ke badan air utama untuk mencegah genangan di kawasan permukiman.
3. SubKegiatan: Penyesuaian Kawasan Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konservasi Pemandiri Bangir, lahar, dan Pengaruh Pantai. Mengurus dokumen perencanaan dan pelaksanaan lingkungan sebagai prasyarat legal dan teknis pelaksanaan konservasi pengendali banjir.
4. SubKegiatan: Pembangunan Palisan/Kolam Retensi. Menyediakan lapangan penampungan sementara air hujan untuk memperlebar aliran permukaan menjadi aliran utama guna mengendapkan lumpur.
5. SubKegiatan: Rehabilitasi Saluran. Memperbaiki saluran yang mengalami kerusakan agar kembali berfungsi sebagai pengumpul dan pengalir debit air.



4.4.2.3. Program Pengaliran Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini direncanakan untuk menciptakan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dan efisien sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko banjir di kawasan pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi.

- Kegiatan: Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sistem drainase yang mampu menyebarkan air hujan langsung ke sungai dengan cepat dan aman.
- SubKegiatan: Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, Meningkatkan kapasitas dan kualitas drainase yang sudah ada agar lebih efisien dalam mengalirkan air hujan.
- SubKegiatan: Penyediaan Sumber Pendukung Sistem Drainase Perkotaan, Penyediaan lapangan pelatihan expert engineer, sediment trap, dan rumah pompa untuk mendukung keberlangsungan sistem drainase.
- SubKegiatan: Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, Melakukan perbaikan infrastruktur drainase yang rusak, tertimbun, atau tidak berfungsi secara optimal.
- SubKegiatan: Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan, Membangun jaringan saluran air hujan di kawasan perkotaan baru atau kawasan yang belum memiliki sistem drainase yang memadai.
- SubKegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan, Penyusunan dokumen

4.4.1.1. Fungsi dan Forma IEU dalam Peningkatan Kualitas Peningkatan Daerah

IEU memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- Menjadi alat ukur kinerja sistem strategi pengantar daerah dalam Subsektor Nasional (Regional Strategy) dan RPJMD.
- Menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja kepala pengantar daerah.
- Menjadi instrumen evaluasi keberhasilan kinerja melalui Laporan Kinerja Sistem Peningkatan Daerah (LKSP).
- Menunjukkan kinerja pribadi yang berdampak langsung pada masyarakat.
- Mengarahkan program dan kegiatan agar terarah, fokus, dan relevan dengan urusan peningkatan daerah yang diantarkan.

4.4.1.2. Tujuan Keberhasilan dari Tujuan dan Gerakan Strategi Pengantar Daerah

Sebagai pengantar daerah menetapkan tujuan strategi yang menggambarkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai. Dari tujuan tersebut, diuraikan menjadi sistem strategi, yaitu hasil akhir yang hendak dicapai dalam lima tahun.

IEU menjadi alat ukur utama untuk memantau apakah pengantar daerah berhasil mencapai sasaran tersebut atau tidak. Sebagai contoh:

- Dalam Pekerjaan Umum menetapkan IEU: Peningkatan jalan dalam kondisi layak.
- Dalam Lapangan Hidup menetapkan IEU: Peningkatan pengurangan jumlah sampah.
- Dalam Kesehatan menetapkan IEU: Peningkatan angka kematian ibu dan bayi.

Keberhasilan IEU ini akan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan RPJMD dan visi pembangunan kepala daerah.

4.4.1.3. Prinsip Penetapan IEU yang Baik

Dalam penyusunannya, IEU harus Memenuhi Tiga Dasarnya yaitu: *Specific, Measurable, dan Achievable*.

- *Specific (Spesifik)*: Jelas dan fokus pada hasil utama.
- *Measurable (Terukur)*: Dapat diukur dengan data kuantitatif yang konsisten.
- *Achievable (Dapat Dicapai)*: Realistik sesuai kapasitas dan kemampuan.
- *Relevant (Relevan)*: Sesuai urusan dan sistem strategi.
- *Time-bound (Batas waktu)*: Dapat dicapai dalam periode RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan pilar utama dalam sistem manajemen kinerja pemerintahan daerah. Dengan adanya IKU yang terukur, relevan, dan berorientasi hasil, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, memastikan penggunaan anggaran secara efektif, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Salah satu IKU banyak pemerintah daerah tidak hanya dapat dipantau dan diukur, tetapi juga menjadi dasar untuk akuntabilitas publik serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2020-2025, Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air (DIMSUDA) memiliki peran strategis dalam mendukung misi pembangunan daerah, khususnya melalui penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang aman dan berkualitas.

4.8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air

Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air adalah *Pemertuaan Jalan dalam Kondisi Mantap dan Pemertuaan Menyangkanya Perlindungan Kawasan Rintan Banjir*, *Pemertuaan Jalan dalam Kondisi Mantap yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Pemertuaan Menyangkanya Perlindungan Kawasan Rintan Banjir yaitu proporsi luas kawasan yang terlindungi terhadap luas total kawasan rentan banjir* (salah 94 Sektor (Pa) serta 104 Kawasan atau sektor dengan 25 sektor).

4.8.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU): Pemertuaan Jalan dalam Kondisi Mantap - Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2020-2025, Dinas Rina Marga dan Sumber Daya Air (DIMSUDA) memiliki peran strategis dalam mendukung misi pembangunan daerah, khususnya melalui penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang aman dan berkualitas.

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis DIMSUDA adalah *Pemertuaan Jalan dalam Kondisi Mantap, yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam*.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis

Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas, terjangkau, dan berfungsi optimal untuk meningkatkan efisiensi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas dan konektivitas jaringan jalan kota yang mantap secara fungsional dan tahan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat dan pembangunan kawasan.

Uraian Kinerja

Indikator: *Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Kondisi Baik dan Sedang) Menurut Perkm (M)*

Rumus: $(\text{Jumlah jalan baik} + \text{sedang}) / \text{total panjang jalan} \times 100$

2. Kondisi Awal dan Target Kinerja 2025-2029

Berdasarkan hasil survei kondisi jalan pada akhir tahun 2024, diperkirakan bahwa 70% dari total jalan kota di Batam telah berada dalam kondisi mantap. Target peningkatan secara bertahap telah ditetapkan dalam rencana strategis.

4.5.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Sumber Banjir – Simas Kota Singapura dan Sumber Daya Air Kota Batam

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, kawasan lahan yang capai dan peningkatan intensitas hujan di kawasan perkotaan, **pangadalan** banjir menjadi salah satu fokus utama Dinas Kota Singapura dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam periode perencanaan tahun 2022-2029. Salah satu aksi utama berkaitan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa **Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Sumber Banjir**.

Indikator ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan kawasan yang mendapatkan perlindungan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan penutupan bantaran sungai untuk risiko bencana hidrometeorologi secara terencana dan berkolaborasi.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis

Meningkatkan kapasitas perlindungan terhadap kawasan zona banjir melalui infrastruktur pengendali yang efektif dan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis

Meningkatnya luas kawasan rumah layak yang mendapat intervensi perlindungan secara struktural maupun nonstruktural.

Uraian Keberhasilan

Indikator: Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rumah Layak
Rumahnya Paman (4)

Rumus: $(\text{luas kawasan yang terlindungi} / \text{luas total kawasan rumah layak}) \times 100$

3. Kondisi Awal dan Target Kinerja 2020-2029

Kota Batam memiliki kawasan perumahan dengan status layak sedang banyak, tetapi kondisinya di wilayah pemukiman padat penduduk seperti Kecamatan Kota Lingsar, Sekeloa, Lelaik Raja, Kota Lingsar, Sekeloa dan Kecamatan Kota Lingsar. Berdasarkan data pemerintah tahun 2024, luas kawasan rumah layak mencapai 49,22 hektar (Ha), setara dengan 189 kawasan yang berada pada 21 sistem drainase.

4.1.1. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kota Lingsar dan Sumber Daya Air

Indikator Kinerja Utama Dinas Kota Lingsar Persentase Jalan Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rumah Layak merupakan bentuk hasil dari kemajuan Dinas Kota Lingsar dan Sumber Daya Air Kota Batam melaksanakan Visi Misi Walikota Batam dalam membangun kota yang tangguh melalui perubahan iklim dan bencana.

Berdasarkan kondisi awal sebagai baseline tahun 2024, persentase jalan mantap Kota Batam diperkirakan sudah berada pada kisaran 89,99% dan total jalan kota sepanjang 41.154,42 Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rumah Layak diperkirakan berada pada kisaran 49,99% (24 unit) layak dari total unit layak 242 unit layak. Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rumah Layak selanjutnya akan persentase target kota sesuai survey total layak di awal 2025 total kawasan layak 155 kawasan dengan luas 59,22 Hektar (Ha) yang berada pada 24 sistem drainase.

Untuk target indikator Kinerja Utama Rencana 2020-2029 secara vertikal ditunjukkan sebagai berikut:

Indikator Persentase Jalan dalam Kondisi Minim yang mencapai target dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Umum. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah diharapkan memenuhi SPM sebagai bentuk jaminan pelayanan dasar bagi masyarakat. Target minimal SPM untuk jalan kabupaten/kota minimal adalah 80% jalan dalam kondisi layak pada awal periode. Menargetkan secara bertahap menuju 90-95% pada akhir tahun 2029. Dengan memenuhi target ini, maka pemerintah daerah secara langsung memastikan hak dasar warga negara atas infrastruktur publik yang layak. Untuk mencapai target ini terdapat Data Dua Marga dan 50% Kota Satam merupakan strategi sebagai berikut:

- Pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan kota secara terpadu dan berkelanjutan.
- Peningkatan kapasitas struktur jalan melalui proyek perkuangan, perbaikan permukaan Lejur, rehabilitasi dan rehabilitasi jalan rusak berat.
- Penerapan sistem informasi jalan berbasis GIS (*Geographic Information System*) untuk manajemen aset jalan dan survey kondisi jalan.
- Integrasi perencanaan jalan dengan pengembangan kawasan dan land-use plan antar pusat-pusat ekonomi.
- Penguatan program dan keahlian teknis teknisi perencanaan pelayanan jalan berdasarkan standar nasional kompetensi.

4.4.3. Persentase Meningkatkan Perlindungan Kawasan Rawan Banjir (Hikmah)

Pengelolaan banjir merupakan bagian krusial dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam pemerintahan tingkat kabupaten/kota. Kota Damar, sebagai kota kepulauan dengan perkembangan kawasan perkotaan yang sangat cepat, menghadapi tantangan nyata dalam mengelola kawasan rawan banjir akibat urbanisasi, kawasan lahan, dan perubahan iklim.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Data Dua Marga dan Sumber Daya Air Kota Satam menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berupa Persentase Meningkatnya Perlindungan Kawasan Rawan Banjir dalam satuan Hektar (Ha) sebagai bagian dari arah kebijakan strategi daerah tahun 2026-2029.

Indikator ini mengukur luas wilayah rawan banjir yang telah mendapatkan perlindungan serta intervensi teknis hidrologis serta lain-lain kawasan rawan banjir yang teridentifikasi. Perlindungan dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul, pemben-
 10

sekunder, belum resmi, terampil, dan pengendalian sampah sangat buruk masih terjadi.

Tujuan utamanya adalah:

- Menurunkan tingkat risiko dan keraguan dalam biaya.
- Meningkatkan daya cakupan layanan pemukiman, layanan kesehatan, dan infrastruktur vital kota.
- Melindungi masyarakat dan aset pemerintah, swasta dan potensi bencana kebetulan lainnya.

Untuk memperluas perlindungan terhadap bencana rumah tangga, Dinas Tata Ruang dan RDA Kota Serang mengurung strategi sebagai berikut:

- Inventarisasi dan pemetaan bencana rumah tangga berbasis spasial melalui pemetaan SIP (Sistem Informasi Geografis).
- Pembangunan dan revitalisasi sistem drainase primer dan sekunder secara terintegrasi antar-kecamatan.
- Pembangunan kanal banjir, Pembangunan saluran air bawah tanah, sumbu resapan, dan rumah pompa di wilayah permukiman umum.
- Pemetaan dan normalisasi saluran drainase (sungai, anak sungai, kanal) untuk meningkatkan kapasitas aliran.
- Normalisasi sistem saluran dan masyarakat dalam penanganan banjir berbasis komunitas dan pemerintah.

4.5.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang dan Sumber Daya Air

Pemilihan indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang dan Sumber Daya Air Kota Serang Perencanaan Jangka Panjang Rendah Rentan dan Perencanaan Menengah Rentan Perencanaan Rendah Rentan Rendah Rentan merupakan bentuk indikator kemampuan Pemukiman Kota Serang dalam melindungi kota yang terdampak terancam perubahan iklim dan bencana.

Dengan strategi yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data, Dinas Tata Ruang dan Sumber Daya Air Kota Serang berkeinginan meningkatkan layanan yang aman, berkelanjutan, dan melindungi pembangunan kota yang inklusif dan resilien.

Berdasarkan kondisi awal (baseline) tahun 2024, persentase jalan umum Kota Serang dipavedisasi berada pada kisaran 88,06% dan total jalan kota sepanjang 11214,85 km dan Berdasarkan kondisi awal (baseline) tahun 2024, Persentase Menyangkanya Perlindungan Kawasan Kawasan Banjir

diperolehkan berada pada kisaran 43,00% (34 titik) hingga 55% (44 titik) dan total titik hingga 140 titik hingga 100 titik. Untuk Persentase Menunggahnya Perbandingan Koneksi Rantai Daging selanjutnya ada perubahan target baru sesuai dengan titik hingga di awal 2024 total koneksi hingga 108 koneksi dengan jumlah 30 titik (34) yang berada pada 24 tahun di mana, untuk target Rantai 2023-2029 akan bertahap diberikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Dumai

No	Indikator	Satuan	Tingkat Tahun						Rata
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Jalan Aspal Rata-Rata Kondisi Melay	%	89.10	88.70	90.00	90.10	90.20	90.10	
2	Persentase Menunggahnya Perbandingan Koneksi Rantai Daging (selanjut)	Koneksi	4.27	11.40	19.58	28.21	36.82	45.43	

SAS V PENCUTUP

Kelemban Sasana Strategi (Kasatri) Damar Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2029 ini merupakan hasil perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan berdasarkan pada hasil, sebagai wujud tanggung jawab administratif dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Batam. Penyusunan Sasana ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2029.

Sebelum tahapan penyusunan Sasana telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip partisipatif, transparansi, politik, dan *regulation-better-up*. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara berbagai strategi Damar Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan arah pembangunan Kota Batam untuk mewujudkan pembangunan terkandung dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2029.

Dalamnya ini selanjutnya menjadi pedoman utama bagi:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Damar Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang mendukung pembangunan daerah;
2. Penyusunan Sasana Kerja (Perjanjian) tahunan Damar yang menjadi acuan dalam penyusunan Sasana Kerja dan Anggaran (SKA) APBD;
3. Instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja pembangunan daerah dalam urusan pekerjaan umum, bidang jalan dan sumber daya air;
4. Tolak ukur pencapaian kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun (2021-2029).

Kami menyadari bahwa dokumen lingkungan strategis, baik dari sisi regulasi, kebijakan nasional, maupun kebijakan masyarakat dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terdapat landasannya, maka dokumen Sasana ini akan ditinjau dan disesuaikan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangun disetelannya dibangun Ratuwa ni, Duta Wana Marga dan Pangeran Daya Ka Kana Taron berkesempatan untuk menyaksikan seluruh strategi dan kebijakan yang telah dimunculkan secara langsung dan disertai dengan penjelasan terperinci. "Antara Kita Wadani Yang Berarti, Bertadaya, Dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Inovasi Dan Perisaiwa" melalui pelayanan infrastruktur jalan dan pengendalian biaya yang berkualitas, aman, dan berkeseluruhan bangunan.

電話: 3902224 傳真: 3902223

MOVING AHEAD

LAMPIRAN

1. 33 Tim Pengajaran, Bekasi AC
2. Ruseffendi, E. 1990
3. Yonius, 2009